



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

TA 2020 AUDITED

BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

BPPK KEMENTERIAN KEUANGAN

Jalan Purnawarman No. 99
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12110



Kemenkeu
Corporate University



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020
Audited



Jalan Purnawarman No.99, RT.3/RW.2, Selong,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12110

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan, berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2021
Kepala Badan,



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	IV
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
<i>A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan</i>	<i>8</i>
<i>A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....</i>	<i>10</i>
<i>A.3. Basis Akuntansi</i>	<i>14</i>
<i>A.4. Dasar Pengukuran.....</i>	<i>14</i>
<i>A.5. Kebijakan Akuntansi</i>	<i>15</i>
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	26
<i>B.1 Pendapatan</i>	<i>28</i>
<i>B.2. Belanja.....</i>	<i>32</i>
<i>B.3 Belanja Pegawai.....</i>	<i>36</i>
<i>B.4 Belanja Barang</i>	<i>37</i>
<i>B.5 Belanja Modal.....</i>	<i>41</i>
<i>B.6 Belanja Badan Layanan Umum</i>	<i>46</i>
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	46
<i>C.1 Kas Pada Badan Layanan Umum.....</i>	<i>46</i>
<i>C.2 Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid).....</i>	<i>47</i>
<i>C.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....</i>	<i>48</i>
<i>C.4 Piutang Bukan Pajak</i>	<i>48</i>
<i>C.5 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.....</i>	<i>49</i>
<i>C.6 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum</i>	<i>49</i>
<i>C.7 Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum.....</i>	<i>50</i>
<i>C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar.....</i>	<i>50</i>
<i>C.9 Persediaan</i>	<i>51</i>
<i>C.10 Tanah</i>	<i>52</i>
<i>C.11 Peralatan dan Mesin.....</i>	<i>52</i>
<i>C.12 Gedung dan Bangunan.....</i>	<i>56</i>
<i>C.13 Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>	<i>59</i>
<i>C.14 Aset Tetap Lainnya.....</i>	<i>60</i>
<i>C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>	<i>61</i>
<i>C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	<i>62</i>
<i>C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi.....</i>	<i>63</i>

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang	63
C.19 Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	64
C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	64
C.21 Aset Tak Berwujud.....	65
C.22 Aset Lain-lain.....	66
C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	69
C.24 Utang kepada Pihak Ketiga	70
C.25 Pendapatan Diterima di Muka.....	70
C.26 Ekuitas.....	70
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	71
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	71
D.2 Beban Pegawai	72
D.3 Beban Persediaan	73
D.4 Beban Barang dan Jasa	73
D.5 Beban Pemeliharaan	75
D.6 Beban Perjalanan Dinas	77
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	78
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	78
D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL	79
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	80
E.1 Ekuitas Awal	80
E.2 Surplus (Defisit) LO.....	81
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	81
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset.....	81
E.5 Transaksi Antar-Entitas.....	83
E.6 Ekuitas Akhir.....	84
LAMPIRAN	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

GEDUNG ARIMURTI LANTAI 2, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON (021) 7394666, 7260451 EXT. 621; FAKSIMILE (021) 7244912; SITUS: WWW.BPPK.KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing satuan kerja merupakan tanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2021
Kepala Badan,



Ditandatangani secara elektronik

Andin Hadiyanto



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, serta telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.949.803.728 atau mencapai 118,42% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp8.402.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp457.953.218.886 atau mencapai 85,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp533.047.579.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.099.001.223.944 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp137.627.114.223; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.956.118.071.040; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp921.193.946; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.334.844.735.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp921.025.008 dan Rp7.098.080.198.936.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.959.354.145, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp396.445.495.179 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai minus Rp388.486.141.034. Defisit Kegiatan Non Operasional dan nilai Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar minus Rp13.252.687.505 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar minus Rp401.738.828.539.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp7.056.642.468.557, dikurangi Defisit-LO sebesar minus Rp401.738.828.539, kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai minus Rp9.201.942.382 dan Transaksi Antar-Entitas senilai Rp452.378.501.300, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp7.098.080.198.936.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020		% thd Angg	31 Desember 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	8.402.000.000	9.949.803.728	118,42	53.342.702.763
JUMLAH PENDAPATAN		8.402.000.000	9.949.803.728	118,42	53.342.702.763
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	93.988.840.000	92.972.844.218	98,92	89.929.238.048
Belanja Barang	B.4	300.964.205.000	228.640.173.191	75,97	448.579.906.933
Jumlah Belanja Operasi		394.953.045.000	321.613.017.409	81,43	538.509.144.981
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.5.1	1.750.300.000	1.750.300.000	100,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.2	72.872.510.000	71.858.550.582	98,61	30.423.544.049
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.3	60.690.362.000	59.950.074.236	98,78	34.477.268.673
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.5.4	-	-	0,00	216.124.062
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	2.781.362.000	2.781.276.659	100,00	627.223.000
Belanja Modal BLU	B.6	-	-	0,00	4.386.457.621
Jumlah Belanja Modal		138.094.534.000	136.340.201.477	98,73	70.130.617.405
JUMLAH BELANJA		533.047.579.000	457.953.218.886	85,91	608.639.762.386

II. NERACA

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 Desember 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% KENAIKAN (PENURUNAN)
ASET				
Aset Lancar				
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1	Rp 130.203.139.070	Rp 125.828.052.928	3,48
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.2	Rp -	Rp 27.099.208	- 100,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.3	Rp 65.432.981	Rp 22.246.575	194,13
Piutang Bukan Pajak	C.4	Rp 812.516.442	Rp 1.048.961.698	- 22,54
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		Rp (812.516.442)	Rp (813.698.669)	- 0,15
Piutang Bukan Pajak (Netto)		Rp -	Rp 235.263.029	- 100,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		Rp -	Rp 2.900.000	- 100,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		Rp -	Rp (14.500)	- 100,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.5	Rp -	Rp 2.885.500	- 100,00
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.6	Rp 290.350.000	Rp 290.350.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		Rp (290.350.000)	Rp (290.350.000)	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		Rp -	Rp -	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.7	Rp 467.335.113	Rp 467.335.113	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		Rp (467.335.113)	Rp (467.335.113)	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		Rp -	Rp -	-
Persediaan	C.9	Rp 7.358.542.172	Rp 4.891.758.278	50,43
Jumlah Aset Lancar		Rp 137.627.114.223	Rp 131.007.305.518	5,05
Aset Tetap				
Tanah	C.10	Rp 5.849.019.335.000	Rp 5.847.269.035.000	0,03
Peralatan dan Mesin	C.11	Rp 396.909.249.593	Rp 369.324.202.207	7,47
Gedung dan Bangunan	C.12	Rp 982.587.912.640	Rp 994.437.240.481	- 1,19
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.13	Rp 34.618.548.864	Rp 38.102.707.911	- 9,14
Aset Tetap Lainnya	C.14	Rp 11.840.125.089	Rp 15.658.221.460	- 24,38
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	Rp 73.567.366.757	Rp 17.325.032.827	324,63
Akumulasi Penyusutan	C.16	Rp (392.424.466.903)	Rp (363.467.532.048)	7,97
Jumlah Aset Tetap		Rp 6.956.118.071.040	Rp 6.918.648.907.838	0,54

Lanjut

Lanjutan ...

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% KENAIKAN (PENURUNAN)
Piutang Jangka Panjang				-
Piutang Tagihan TP/TGR	C.17	Rp 1.419.843.783	Rp 1.402.342.642	1,25
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP/TGR	C.18	Rp (1.419.843.783)	Rp (1.402.342.642)	1,25
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		Rp -	Rp -	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.19	Rp 925.823.061	Rp 1.110.987.674	- 16,67
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.20	Rp (4.629.115)	Rp (5.554.938)	- 16,67
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)		Rp 921.193.946	Rp 1.105.432.736	- 16,67
Jumlah Piutang Jangka Panjang		Rp 921.193.946	Rp 1.105.432.736	- 16,67
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	C.21	Rp 5.262.041.938	Rp 9.000.979.584	- 41,54
Aset Lain-Lain	C.22	Rp 23.893.003.272	Rp 23.751.388.112	0,60
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	Rp (24.820.200.475)	Rp (25.662.932.204)	- 3,28
Jumlah Aset Lainnya		Rp 4.334.844.735	Rp 7.089.435.492	- 38,85
JUMLAH ASET		Rp 7.099.001.223.944	Rp 7.057.851.081.584	0,58
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	Rp 847.400.538	Rp 1.086.643.866,00	- 22,02
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	Rp 73.624.470	Rp 121.969.161	- 39,64
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 921.025.008	Rp 1.208.613.027	- 23,79
JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 921.025.008	Rp 1.208.613.027	- 23,79
EKUITAS DANA	C.26	Rp 7.098.080.198.936	Rp 7.056.642.468.557	0,59
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		Rp 7.099.001.223.944	Rp 7.057.851.081.584	0,58

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	7.959.354.145	51.264.300.055
JUMLAH PENDAPATAN		7.959.354.145	51.264.300.055
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	93.908.288.434	91.224.666.420
Beban Persediaan	D.3	6.430.940.135	17.910.653.228
Beban Barang dan Jasa	D.4	184.084.689.445	333.666.413.679
Beban Pemeliharaan	D.5	25.846.998.524	21.407.984.227
Beban Perjalanan Dinas	D.6	8.720.170.748	74.527.666.419
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	77.526.446.859	70.113.862.691
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(72.038.966)	(57.642.262)
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		396.445.495.179	608.793.604.402
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(388.486.141.034)	(557.529.304.347)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.9		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.379.680.546	612.135.499
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		14.787.915.835	1.851.817.320
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		710.249.260	7.351.801.308
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		554.701.476	6.840.790.688
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(13.252.687.505)	(728.671.201)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(401.738.828.539)	(558.257.975.548)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		(401.738.828.539)	(558.257.975.548)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Awal	E.1	7.056.642.468.557	6.864.286.856.450
Surplus/Defisit LO	E.2	(401.738.828.539)	(558.257.975.548)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	E.3	-	-
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	(9.201.942.382)	168.913.281.177
- Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
- Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	4.788.617
- Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	(31.720.882)	(31.044.720)
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	(287.657.000)	158.181.512.371
- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	(8.882.564.500)	9.455.748.289
- Koreksi Lainnya	E.4.5	-	1.302.276.620
Transaksi Antar Entitas	E.5	452.378.501.300	581.700.306.478
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		41.437.730.379	192.355.612.107
Ekuitas Akhir	E.6	7.098.080.198.936	7.056.642.468.557

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan negara, khususnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu **"Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Salah satu kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan kepada unit pengguna, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK.

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan diperlukan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas. Perubahan paradigma saat ini, di mana sumber daya manusia adalah aset atau modal yang berharga dan perlu dikembangkan. BPPK tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, BPPK harus menjadi contoh pendidikan dan pelatihan yang mengembangkan modal manusia atau *human capital* tidak hanya di Kementerian Keuangan tetapi juga pengembangan modal sumber daya manusia pengelola keuangan negara bagi Republik Indonesia. BPPK diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan menghadapi tantangan yang ada.

Visi BPPK disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan. Dengan visi yang baru, BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi, tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020-2024, visi dan misi BPPK adalah sebagai berikut:

Visi

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Beretika.

Misi

1. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
2. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi pada SDM Keuangan Negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
3. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
4. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
5. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

Arah Kebijakan BPPK

Arah kebijakan BPPK pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Keuangan, serta mencapai sasaran strategis organisasi BPPK adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan negara, termasuk pada penguasaan teknologi informasi.
2. Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal.
3. Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara.
4. Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan.
5. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan.

6. Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*.
7. Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien.

Tugas, Fungsi dan Peran

BPPK beralamat di Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPPK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
2. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil pendidikan di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan, entitas pelaporan pemerintah pusat menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
 15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan;

17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
20. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 Tahun 2020 (Khusus): Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPPK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang. SAI meliputi: transaksi BMN, transaksi persediaan, transaksi pembayaran, transaksi anggaran, transaksi realisasi, transaksi akrual, transaksi BLU, dan transaksi lainnya. Untuk mendukung penerapan SAI berbasis akrual dan terintegrasi, maka digunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Modul-modul dalam Aplikasi SAKTI terdiri dari: Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Pelaporan. Keseluruhan proses transaksi keuangan dan barang termuat pada Modul Pelaporan. Modul Pelaporan ini menghasilkan laporan-laporan, diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini merupakan laporan gabungan dari seluruh jenjang struktural di bawah BPPK yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi dalam lingkup BPPK adalah 20 (dua puluh) entitas. Rincian entitas akuntansi tersebut tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	T	M	T	M	T	M	T	
1	0199	Satker BPPK pusat	7								7
2	0200	Prov Jawa Barat			2						2
3	0300	Prov Jawa Tengah			1						1
4	0400	Prov DI Yogyakarta			1						1
5	0500	Prov Jawa Timur			1						1
6	0700	Prov Sumatra Utara			1						1
7	1100	Prov Sumatra Selatan			1						1
8	1600	Prov Kalimantan Timur			1						1
9	1700	Prov Sulawesi Utara			1						1
10	1900	Prov Sulawesi Selatan			1						1

11	220 0	Prov. Bali			1						1
12	135 1	Prov. Kalimantan Barat			1						1
13	090 0	Prov. Riau			1						1
Jumlah			7		13						20

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPPK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - Pendapatan yang berasal dari BLU PKN STAN, di antaranya: Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang diakui setelah pengesahan BLU.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Semua pendapatan-LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi pendapatan-LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan di neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Ketentuan mengenai perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketentuan Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum

tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

*Piutang Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat, tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(9) Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*Franchise*);
 - d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
- Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
- Nilai yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 30 September 2016 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 30 September 2016. Untuk Aset Tak

Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 30 September 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.

- Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan **mulai Tahun Anggaran 2016**.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018, masa manfaat Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10

8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
8	01	01	01	026	Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000, 1 : 500.000, 1 : 250.000)	20
8	01	01	01	027	Peta RBI Skala Menengah (1:100.000, 1 : 50.000, 1 : 25.000)	10
8	01	01	01	028	Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.500, 1 : 1.000)	5
8	01	01	01	029	Peta LLN Skala Kecil (1 : 500.000, 1 : 250.000)	20
8	01	01	01	030	Peta LLN Skala Menengah (1 : 50.000)	12
8	01	01	01	031	Peta LPI Skala Kecil (1 : 250.000)	20
8	01	01	01	032	Peta LPI Skala Menengah (1 : 50.000, 1 : 25.000)	12
8	01	01	01	033	Peta LPI Skala Besar (1 : 10.000)	5
8	01	01	01	034	Peta Batas Wilayah Administrasi	10
8	01	01	01	035	Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi	5
8	01	01	01	036	Peta Batas Negara	10
8	01	01	01	037	Data Pasang Surut	20
8	01	01	01	038	Data GNSS	20
8	01	01	01	039	Data Gaya Berat	20
8	01	01	01	040	Data Pengukuran Sifat Datar Teliti	10
8	01	01	01	041	Citra Satelit Resolusi Tinggi	5
8	01	01	01	042	Citra Satelit Resolusi Sedang	10
8	01	01	01	043	Foto Udara	5
8	01	01	01	044	Peta Tematik Morfometri	5

8	01	01	01	045	Peta Tematik Penutup Lahan	5
8	01	01	01	046	Peta Tematik Sistem Lahan	5
8	01	01	01	047	Peta Tematik Lainnya	5
8	01	01	01	048	Atlas	10

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan Akual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPPK melakukan revisi pagu anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja BPPK Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan revisi anggaran berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat di tabel 5.

Tabel 4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPPK TA 2020

Uraian	2020	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Direvisi (Rp)
Pendapatan		
PNBP Lainnya	1.070.000.000	1.070.000.000
Pendapatan BLU	30.834.000.000	7.332.000.000
Jumlah Pendapatan	31.904.000.000	8.402.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	88.748.310.000	93.988.840.000
Belanja Barang	448.411.121.000	300.964.205.000
Belanja Modal	192.769.834.000	138.094.534.000
Jumlah Belanja	729.929.265.000	533.047.579.000

Tabel 5. Revisi Anggaran Belanja BPPK TA 2020 per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	2020	
		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Direvisi (Rp)
1731	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah	111.863.223.000	91.640.462.000
1732	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	24.568.011.000	21.424.613.000
1733	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai	41.811.797.000	27.521.807.000
1734	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	17.698.660.000	15.927.706.000
1735	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	32.019.804.000	17.994.458.000
1736	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan	35.648.536.000	30.860.536.000
1737	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	132.691.448.000	83.011.544.000
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (Politeknik Keuangan Negara STAN)	263.554.675.000	172.958.992.000
1739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPK	70.073.111.000	71.707.461.000
	JUMLAH	729.929.265.000	533.047.579.000

Perubahan target pendapatan PNBPN berasal dari target pendapatan PNBPN PKN STAN sesuai dengan Nota Dinas Direktur PKN STAN nomor ND-1466/PKN/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Pemutakhiran Proposal PNBPN Satuan Kerja BLU Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2020. Berdasarkan simulasi dan pendapat pihak pelaksana kegiatan, target pendapatan PNBPN PKN STAN Tahun 2020 menjadi Rp7.332.000.000 atau turun sebesar 76,22% dari target awal sebesar Rp30.834.000.000. Adapun alasan/pertimbangan perubahan target ini adalah:

1. sehubungan dengan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan beberapa kegiatan PKN STAN tidak dapat dilaksanakan, yaitu pelatihan dan brevet, serta kerjasama kediklatan;
2. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN untuk tahun 2020 tidak dilaksanakan.

Perubahan atau revisi pagu anggaran sampai dengan periode TA 2020 adalah penghematan anggaran yang diusulkan melalui nota dinas Sekretaris Badan nomor ND-59/PP/2020 tanggal 24 April 2020 hal Usulan Revisi Anggaran dengan nilai penghematan sebesar Rp173.379.686.000. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan realokasi anggaran lingkup BPPK yang diusulkan melalui Surat Kepala

Badan nomor S-40/PP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 hal Usulan Revisi Anggaran BPPK TA 2020. Revisi atau realokasi anggaran lingkup BPPK ini terkait dengan:

1. adanya perubahan pola pelatihan dari klasikal menjadi *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh;
2. pemenuhan peralatan penunjang pembelajaran jarak jauh, percepatan pengadaan pemenuhan sarana dan prasarana yang sebelumnya direncanakan di tahun 2021, pemenuhan peralatan penunjang *new thinking of working* (NTOW); dan
3. adanya perubahan kebutuhan dan prioritas penggunaan anggaran.

Selanjutnya dilakukan revisi anggaran kembali sesuai dengan Surat Kepala BPPK nomor S-58/PP/2020 tanggal 11 November 2020 hal Usulan Revisi Anggaran. Adapun alasan/pertimbangan dilakukan revisi adalah:

1. terdapat kekurangan anggaran belanja pegawai sampai dengan akhir tahun 2020;
- 2.antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan.

Realisasi
Pendapatan
Rp9.949.803.72
8

B.1 Pendapatan

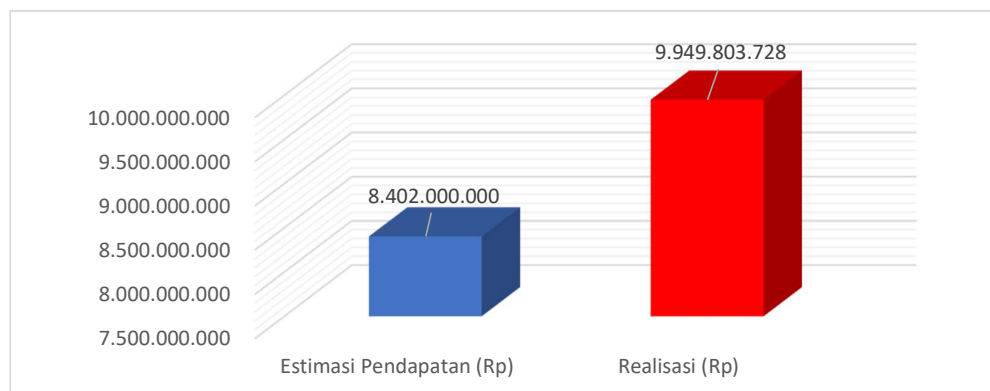
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.949.803.728 atau mencapai 118,42% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp8.402.000.000. Pendapatan lingkup BPPK terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan dari Badan Layanan Umum. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2020

MAP	Uraian Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.822.000.000	969.700.000	53,22
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	49.000.000	0,00
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	573.000.000	0,00
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.510.000.000	4.799.694.932	87,11
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	13.630.000	0,00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	72.837.850	0,00
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	23.925.000	0,00
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	2.700.000	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	852.761.109	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	526.919.437	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	77.209.686	0,00

MAP	Uraian Pendapatan	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	-	3.200.000	0,00
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	1.070.000.000	816.000.000	76,26
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	417.000.000	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	2.900.000	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	40.125.580	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	60.373.436	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	590.480.783	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	48.545.915	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	9.800.000	0,00
	JUMLAH	8.402.000.000	9.949.803.728	118,42

Komposisi estimasi dan realisasi pendapatan BPPK TA 2020 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Estimasi dan Realisasi Pendapatan BPPK TA 2020

Realisasi PNBK periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp-43.392.899.035 atau -81,35% dibandingkan 31 Desember 2019. Secara umum penurunan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. penurunan yang berasal dari Pendapatan BLU PKN STAN sebesar Rp-40.107.832.814 atau -86,05%, hal ini disebabkan pada tahun 2020 ini tidak terdapat Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN, kegiatan pelatihan dan brevet tidak terlaksana, serta kerjasama kediklatan yang tidak terlaksana karena adanya pandemi COVID-19;

2. penurunan yang berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp-3.285.066.221 atau -48,79%, PNBP Lainnya lingkup BPPK merupakan penerimaan pendapatan yang bersifat insidental kecuali untuk Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya yang memiliki estimasi pendapatan. Penerimaan pendapatan yang berasal dari PNBP lainnya lebih rendah dari tahun sebelumnya disebabkan:
- pada TA 2019 terdapat pendapatan penerimaan belanja modal TAYL yang cukup signifikan,
 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehingga frekuensi kegiatan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dan Cukai dibatasi dan jumlah peserta ujian menjadi berkurang;
 - selain itu, beberapa penerimaan PNBP juga mengalami penurunan, diantaranya: pendapatan sewa gedung, pendapatan pendidikan lainnya, pendapatan anggaran lain-lain yang pada tahun 2019 berasal dari setoran biaya diklat Prajabatan dari Kementerian Negara/Lembaga luar Kementerian Keuangan.

Perbandingan realisasi pendapatan BPPK TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan TA 2019

AKUN	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Rp	%
	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	3.448.015.946	6.733.082.167	(3.285.066.221)	-48,79
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	2.700.000	-	2.700.000	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	852.761.109	278.402.609	574.358.500	206,30
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	526.919.437	333.732.890	193.186.547	57,89
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	77.209.686	301.831.345	(224.621.659)	-74,42
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tusi	3.200.000	45.100.000	(41.900.000)	-92,90
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	816.000.000	1.866.000.000	(1.050.000.000)	-56,27
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	417.000.000	962.800.000	(545.800.000)	-56,69
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.900.000	7.300.000	(4.400.000)	-60,27
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	-	-	0,00

AKUN	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)	Rp	%
	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	3.448.015.946	6.733.082.167	(3.285.066.221)	-48,79
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	40.125.580	200.390.102	(160.264.522)	-79,98
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	60.373.436	59.451.729	921.707	1,55
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	590.480.783	460.534.525	129.946.258	28,22
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	48.545.915	920.546.342	(872.000.427)	-94,73
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	267.500	(267.500)	-100,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.800.000	1.296.725.125	(1.286.925.125)	-99,24
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	6.501.787.782	46.609.620.596	(40.107.832.814)	-86,05
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	969.700.000	34.806.410.002	(33.836.710.002)	-97,21
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	-	-	0,00
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	49.000.000	247.000.000	(198.000.000)	-80,16
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	0,00
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	573.000.000	5.713.535.000	(5.140.535.000)	-89,97
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.799.694.932	5.625.314.394	(825.619.462)	-14,68
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	2.199.000	(2.199.000)	-100,00
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	13.630.000	-	13.630.000	0,00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	72.837.850	215.162.200	(142.324.350)	-66,15
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	23.925.000	-	23.925.000	0,00
	JUMLAH	9.949.803.728	53.342.702.763	(43.392.899.035)	-81,35

Adapun Rincian estimasi dan realisasi PNBP per Satuan Kerja dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per Satuan Kerja
TA 2020**

No	Satuan Kerja	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BPPK Pusat	-	98.913.430	0,00
2	Pusdiklat PSDM	-	271.897.814	0,00
3	Pusdiklat KNPK	-	78.463.519	0,00
4	PKN STAN	7.332.000.000	7.771.850.125	106,00
5	Pusdiklat Pajak	-	73.249.450	0,00
6	Pusdiklat BC	1.070.000.000	876.188.465	81,89
7	Pusdiklat KU	-	182.651.844	0,00
8	Pusdiklat AP	-	62.698.718	0,00
9	BD Pim Magelang	-	132.266.659	0,00
10	BDK Medan	-	101.712.665	0,00
11	BDK Palembang	-	51.728.692	0,00
12	BDK Yogyakarta	-	5.358.892	0,00
13	BDK Malang	-	94.129.339	0,00
14	BDK Balikpapan	-	11.459.600	0,00
15	BDK Makassar	-	5.850.253	0,00
16	BDK Cimahi	-	41.587.400	0,00
17	BDK Manado	-	39.761.334	0,00
18	BDK Pontianak	-	7.342.847	0,00
19	BDK Pekanbaru	-	42.692.682	0,00
20	BDK Denpasar	-	-	0,00
	TOTAL	8.402.000.000	9.949.803.728	118,42

Realisasi Belanja
Rp457.953.218.886
86

B.2. Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp457.953.218.886 atau 85,91% dari anggaran belanja sebesar Rp533.047.579.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10.

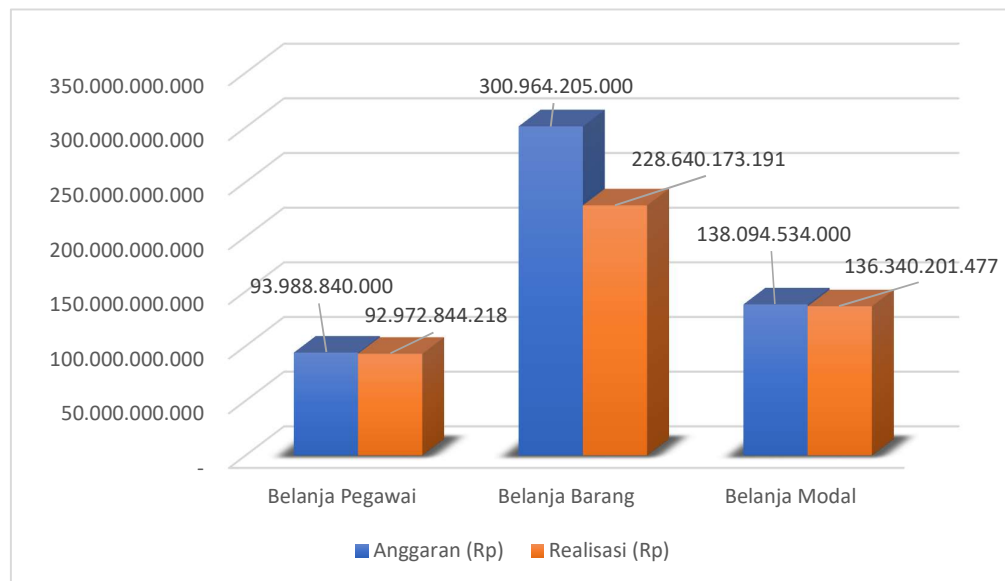
Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2020

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	93.988.840.000	93.000.306.486	98,95
52	Belanja Barang	300.964.205.000	229.301.303.656	76,19
53	Belanja Modal	138.094.534.000	136.340.201.477	98,73
	Total Belanja Bruto	533.047.579.000	458.641.811.619	86,04
	Pengembalian Belanja		(688.592.733)	
	Belanja Netto	533.047.579.000	457.953.218.886	85,91

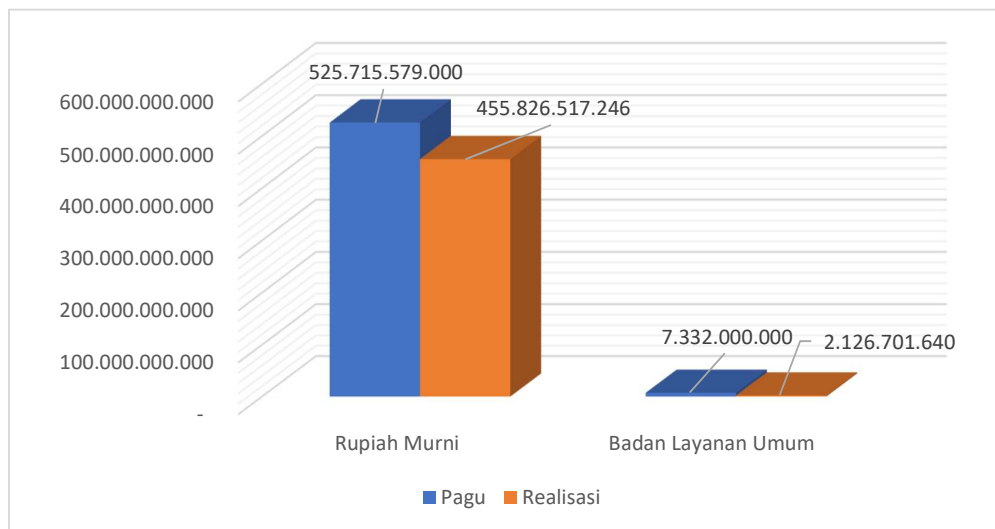
Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2020

No	Sumber Dana	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	525.715.579.000	455.826.517.246	86,71
2	PNBP (PKN STAN)	7.332.000.000	2.126.701.640	29,01
	TOTAL	533.047.579.000	457.953.218.886	85,91

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja TA 2020 dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2020

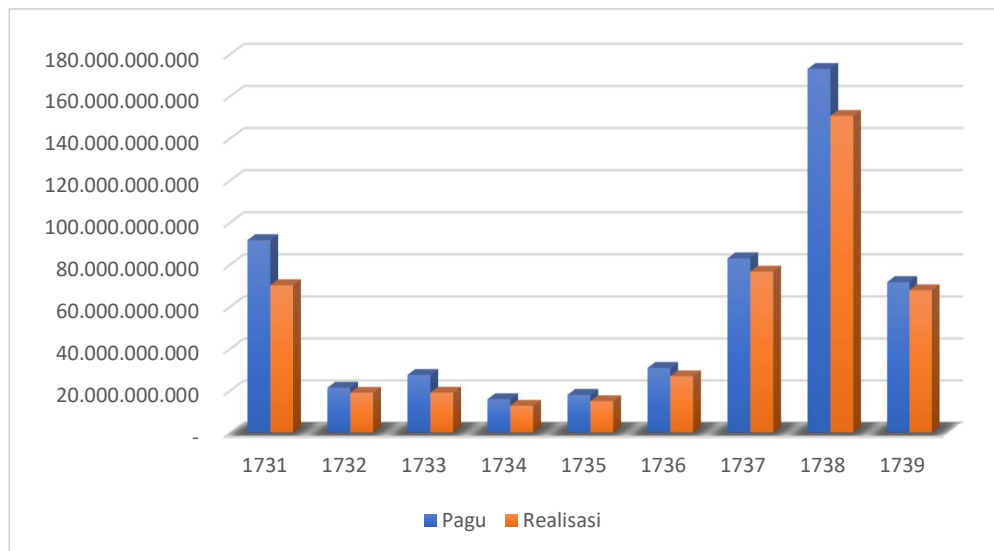


Gambar 3. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2020

Realisasi belanja berdasarkan jenis kegiatan untuk TA 2020 dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 4.

Tabel 11. Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2020

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1731	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Keuangan Negara di Daerah	91.640.462.000	70.211.056.923	76,62
1732	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	21.424.613.000	18.982.014.063	88,60
1733	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepabeanan dan Cukai	27.521.807.000	19.015.740.361	69,09
1734	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	15.927.706.000	12.784.935.279	80,27
1735	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	17.994.458.000	14.916.340.277	82,89
1736	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Perpajakan	30.860.536.000	26.846.850.272	86,99
1737	Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kepemimpinan dan Manajemen serta Pengelolaan Beasiswa Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan	83.011.544.000	76.681.274.857	92,37
1738	Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Bidang Keuangan Negara (Politeknik Keuangan Negara STAN)	172.958.992.000	150.671.373.972	87,11
1739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPK	71.707.461.000	67.843.632.882	94,61
	JUMLAH	533.047.579.000	457.953.218.886	85,91



Gambar 4. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan TA 2020

Pagu dan realisasi anggaran per Satuan Kerja di lingkungan BPPK dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Pagu dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja TA 2020

No	Unit/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	BPPK Pusat	71.707.461.000	67.843.632.882	94,61
2	Pusdiklat PSDM	75.740.173.000	70.967.320.996	93,70
3	Pusdiklat KNPk	15.927.706.000	12.784.935.279	80,27
4	PKN STAN	172.958.992.000	150.671.373.972	87,11
5	Pusdiklat Pajak	30.860.536.000	26.846.850.272	86,99
6	Pusdiklat BC	27.521.807.000	19.015.740.361	69,09
7	Pusdiklat KU	17.994.458.000	14.916.340.277	82,89
8	Pusdiklat AP	21.424.613.000	18.982.014.063	88,60
9	BD Pim Magelang	7.271.371.000	5.713.953.861	78,58
10	BDK Medan	8.521.187.000	6.389.133.899	74,98
11	BDK Palembang	7.672.121.000	6.345.041.551	82,70
12	BDK Yogyakarta	8.755.120.000	7.971.394.915	91,05
13	BDK Malang	11.086.858.000	8.522.539.017	76,87
14	BDK Balikpapan	7.989.958.000	6.657.538.630	83,32
15	BDK Makassar	8.522.750.000	5.506.311.196	64,61
16	BDK Cimahi	10.672.806.000	8.639.952.965	80,95
17	BDK Manado	6.234.075.000	5.869.566.496	94,15
18	BDK Pontianak	6.779.932.000	6.244.717.114	92,11
19	BDK Pekanbaru	9.013.316.000	5.100.295.091	56,59
20	BDK Denpasar	6.392.339.000	2.964.566.049	46,38
	Total Belanja	533.047.579.000	457.953.218.886	85,91

Jika dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp-150.686.543.500 atau -24,76%. Adapun penurunan ini disebabkan :

1. adanya penurunan pagu anggaran belanja barang sehubungan dengan realokasi anggaran;
2. adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan mengalami perubahan metode pelaksanaan dari tatap muka menjadi virtual melalui *video conference* baik pada kegiatan pelatihan maupun kegiatan-kegiatan lainnya; dan
3. adanya pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan beberapa kegiatan tertunda atau dibatalkan sehingga realisasi belanja kurang optimal.

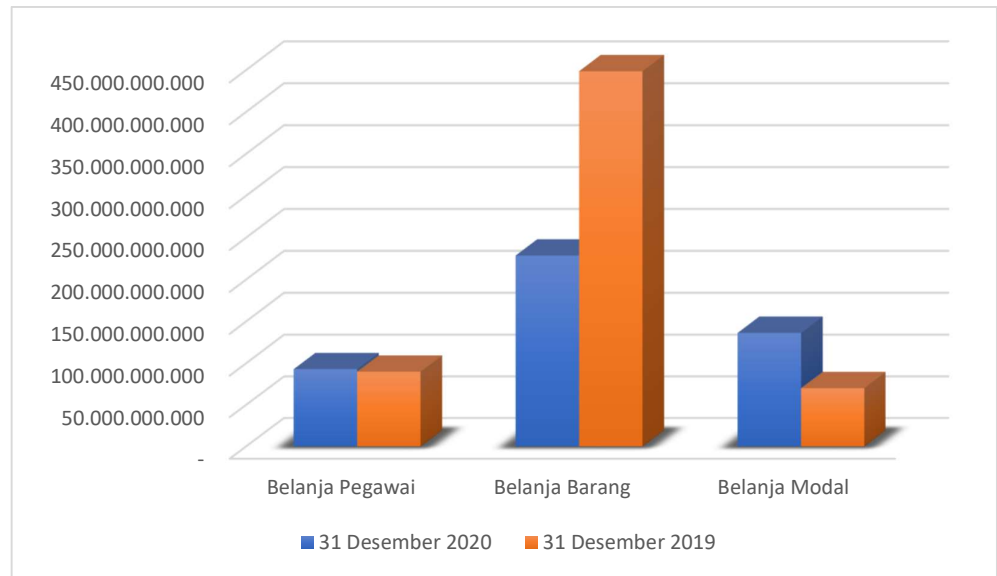
Berikut adalah penjelasan terkait kurang optimalnya penyerapan anggaran lingkup BPPK sampai dengan TA 2020.

1. Adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan dari rencana awal dan perubahan metode pelaksanaannya dari yang semula tatap muka langsung (klasikal) menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning*. Perubahan ini menyebabkan realisasi anggaran kurang optimal sehingga dilakukan realokasi anggaran.
2. Selain kegiatan pelatihan, beberapa kegiatan lain juga mengalami penundaan atau dilaksanakan secara virtual sehingga anggaran tidak terserap optimal sehingga dilakukan realokasi anggaran.

Perbandingan realisasi belanja BPPK menurut jenis belanja antara TA 2020 dengan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 13 dan Gambar 5.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019	Rp	%
51	Belanja Pegawai	92.972.844.218	89.929.238.048	3.043.606.170	3,38
52	Belanja Barang	228.640.173.191	448.579.906.933	(219.939.733.742)	-49,03
53	Belanja Modal	136.340.201.477	70.130.617.405	66.209.584.072	94,41
	TOTAL	457.953.218.886	608.639.762.386	(150.686.543.500)	-24,76



Gambar 5. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

Belanja Pegawai
Rp92.972.844.218

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp92.972.844.218 dan Rp89.929.238.048. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai BPPK TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.043.606.170 atau 3,38% dibanding realisasi TA 2019. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai BPPK, adanya kenaikan pangkat/golongan pegawai, dan kenaikan gaji berkala.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja pegawai TA 2020 dapat dilihat pada Tabel 14, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja pegawai TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TA 2020

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	93.722.861.000	92.913.902.486	99,14
5122	Belanja Lembur	265.979.000	86.404.000	32,49
	Jumlah Bruto	93.988.840.000	93.000.306.486	98,95
	Pengembalian Belanja		(27.462.268)	
	Jumlah Neto	93.988.840.000	92.972.844.218	98,92

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

Akun	Belanja Pegawai	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	92.913.902.486	89.762.913.186	3.150.989.300	3,51%
5122	Belanja Lembur	86.404.000	198.118.000	(111.714.000)	-56,39%
	Jumlah Bruto	93.000.306.486	89.961.031.186	3.039.275.300	3,38%
	Pengembalian Belanja	(27.462.268)	(31.793.138)	4.330.870	-13,62%
	Jumlah Neto	92.972.844.218	89.929.238.048	3.043.606.170	3,38%

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp228.640.173.191 dan Rp448.579.906.933.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp-219.939.733.742 atau -49,03% dibandingkan dengan TA 2019. Adapun penjelasan kondisi belanja barang TA 2020 sebagai berikut.

1. Belanja Barang Operasional lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja barang operasional digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Sampai dengan periode ini belanja barang operasional meningkat sehubungan dengan adanya belanja penanganan pandemi COVID-19 di satker-satker lingkup BPPK.
2. Belanja Barang Non Operasional lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, belanja barang non operasional lingkup BPPK digunakan untuk kegiatan pelatihan. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan mengalami perubahan metode pelaksanaan kegiatan dari tatap muka langsung menjadi virtual, sementara beberapa kegiatan ditunda dan/atau dibatalkan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang sebelumnya dilakukan secara klasikal (tatap muka) diubah menjadi Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning* sehingga belanja terkait kegiatan pelatihan tidak terserap optimal, diantaranya: biaya konsumsi, honorarium diklat, dan laundry. Kegiatan-kegiatan lain, seperti: *workshop*,

Belanja Barang
Rp228.640.173.
191

seminar, kegiatan *assessment*, bimbingan teknis, dan rapat-rapat juga dilakukan secara daring. Pada belanja non operasional terdapat pengembalian belanja yang berasal dari pengembalian belanja *tuition/allowance* beasiswa.

3. Belanja Barang Persediaan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Persediaan sebagian besar digunakan untuk keperluan ATK pelatihan dan sebagian untuk keperluan perkantoran. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kegiatan pelatihan tidak dilaksanakan dengan metode tatap muka langsung (klasikal) sehingga tidak memerlukan ATK pelatihan.
4. Belanja Pemeliharaan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pemeliharaan gedung dan bangunan yang akan digunakan untuk menunjang penerapan *Flexible Working Space (FWS)* di lingkungan BPPK, pemeliharaan gedung PHRD sebagai persiapan *predeparture training*, pemeliharaan gedung dan bangunan di lingkungan PKN STAN, dan beberapa pemeliharaan rutin gedung dan bangunan di lingkungan BPPK.
5. Belanja Jasa lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan realisasi belanja daya dan jasa berkurang sehubungan dengan penerapan *work from home (WFH)*, dan tidak optimalnya realisasi Belanja Jasa Profesi terkait pelaksanaan pelatihan yang tertunda/dibatalkan/ dialihkan menggunakan metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan *e-learning*.
6. Belanja Perjalanan Dalam Negeri mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja perjalanan dalam negeri BPPK sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas diklat peserta pelatihan. Penurunan ini terjadi sehubungan dengan penerapan metode *e-learning* dan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) menggantikan metode tatap muka (klasikal) pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan BPPK. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan secara virtual sehingga tidak membutuhkan belanja perjalanan.
7. Belanja Perjalanan Luar Negeri mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan batalnya keikutsertaan BPPK dalam kegiatan *Forum International CorPu Summit* dan *ATD International Conference* karena adanya pandemi COVID-19.

8. Belanja Barang BLU mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN tidak dilaksanakan di tahun 2020. Selain itu, kegiatan kerjasama pendidikan dengan Pemerintah Daerah dan pelatihan brevet tertunda dan/atau dibatalkan karena adanya pandemi COVID-19.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja barang TA 2020 dapat dilihat pada Tabel 16, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja barang TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang TA 2020

Akun	Belanja Barang	Anggaran	Realisasi	%
5211	Belanja Barang Operasional	47.421.892.000	45.260.019.358	95,44
5212	Belanja Barang Non Operasional	113.525.746.000	86.853.384.725	76,51
5218	Belanja Barang Persediaan	13.717.736.000	8.949.589.383	65,24
5221	Belanja Jasa	71.136.265.000	51.398.301.430	72,25
5231	Belanja Pemeliharaan	28.615.175.000	25.770.416.525	90,06
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	19.145.259.000	8.873.527.301	46,35
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	70.132.000	69.363.294	98,90
5251	Belanja Barang BLU	7.332.000.000	2.126.701.640	29,01
	Jumlah Bruto	300.964.205.000	229.301.303.656	76,19
	Pengembalian Belanja		(661.130.465)	
	Jumlah Neto	300.964.205.000	228.640.173.191	75,97

Tabel 17. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

Akun	Belanja Barang	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5211	Belanja Barang Operasional	45.260.019.358	41.430.273.796	3.829.745.562	9,24%
5212	Belanja Barang Non Operasional	86.853.384.725	185.004.336.034	(98.150.951.309)	-53,05%
5218	Belanja Barang Persediaan	8.949.589.383	17.168.567.227	(8.218.977.844)	-47,87%
5221	Belanja Jasa	51.398.301.430	97.602.546.060	(46.204.244.630)	-47,34%
5231	Belanja Pemeliharaan	25.770.416.525	21.563.386.874	4.207.029.651	19,51%
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	8.873.527.301	67.865.030.500	(58.991.503.199)	-86,92%
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	69.363.294	4.368.560.454	(4.299.197.160)	-98,41%
5251	Belanja Barang BLU	2.126.701.640	15.819.916.120	(13.693.214.480)	-86,56%
	Jumlah Bruto	229.301.303.656	450.822.617.065	(221.521.313.409)	-49,14%
	Pengembalian Belanja	(661.130.465)	(2.242.710.132)	1.581.579.667	-70,52%
	Jumlah Neto	228.640.173.191	448.579.906.933	(219.939.733.742)	-49,03%

Belanja terkait dengan penanganan COVID-19 di lingkungan BPPK disajikan dalam tabel 18 sebagai berikut.

Tabel 18. Belanja Penanganan COVID-19 TA 2020

Kode Akun	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	2.419.809.000	2.239.000.266	92,53
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	2.465.713.000	1.236.544.658	50,15
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	668.835.000	615.495.100	92,02
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	937.995.000	677.349.327	72,21
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	99.286.000	76.274.315	76,82
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	33.573.000	-	0,00
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	1.358.974.000	1.356.338.099	99,81
	Total Belanja Bruto	7.984.185.000	6.201.001.765	77,67

Realisasi belanja BPPK terkait penanganan COVID-19 ini digunakan untuk:

1. akun 521131 digunakan untuk pembelian perlengkapan pelindung diri (seperti: masker, *face shield*, sarung tangan, dan APD), perlengkapan kebersihan (*hand sanitizer*, sabun cuci tangan, disinfektan), dan karantina mandiri pegawai yang terdampak COVID-19;
2. akun 521241 digunakan untuk bantuan biaya komunikasi untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mahasiswa PKN STAN dan peserta pelatihan;
3. akun 521841 digunakan untuk pembelian perlengkapan pelindung diri (seperti: masker, *face shield*, sarung tangan, dan APD), perlengkapan kebersihan (*hand sanitizer*, sabun cuci tangan, disinfektan) yang dimaksudkan sebagai persediaan;
4. akun 522192 digunakan untuk pembayaran jasa penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor, biaya tes kesehatan pegawai (*rapid test*, *PCR*, *swab test*, dan lain-lain);
5. akun 523114 digunakan untuk pembuatan peralatan kebersihan (wastafel sementara maupun wastafel permanen);
6. akun 532119 digunakan untuk pembelian peralatan kesehatan (berupa *thermogun*, *thermos scanner*, *swing barrier*, *rab barrier*).

Adapun rincian realisasi belanja dalam rangka penanganan COVID-19 per satuan kerja dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan.

Belanja Modal
Rp136.340.201.
477

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp136.340.201.477 dan Rp70.130.617.405. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp66.209.584.072 atau 94,41% dibandingkan TA 2019. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait penyerapan anggaran belanja modal TA 2020.

1. Belanja Modal Tanah lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tahun ini terdapat pembelian tanah yang berlokasi di Cirebon.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengadaan peralatan yang mendukung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pengadaan pengembangan infrastruktur jaringan BPPK, pengadaan laptop untuk menunjang pelaksanaan *Flexible Working Space (FWS)* di lingkungan BPPK, pengadaan interior gedung pada PKN STAN, pengadaan perangkat akses kontrol PKN STAN, pengadaan kendaraan, dan beberapa pengadaan lainnya.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tahun 2020 terdapat beberapa pengadaan yang cukup signifikan, diantaranya: pekerjaan jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Pendidikan PKN STAN; pekerjaan jasa konsultan dan renovasi Gedung H Sekretariat Badan; pekerjaan jasa konsultan dan renovasi selasar gedung BDK Palembang; pekerjaan jasa konsultan, pengawas, dan konstruksi Asrama BDK Balikpapan; pekerjaan jasa konsultan perencana dan pekerjaan konstruksi renovasi atap dan lapangan BDK Manado; pekerjaan jasa konsultan dan konstruksi renovasi ruangan kelas Pusdiklat Bea Cukai; pekerjaan jasa konsultan konstruksi perencanaan pembangunan lanjutan gedung asrama dan pekerjaan renovasi ruang multimedia Pusdiklat Keuangan Umum; pengadaan jasa konsultan perencanaan renovasi asrama BDK Malang; dan pengadaan jasa konsultan perencanaan pekerjaan renovasi atap gedung BDK Pontianak.
4. Belanja Modal Lainnya lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pengadaan *software* Microsoft Office, pengadaan *software* windows 10, pengadaan *software* PJJ, pengadaan *software knowledge management*, pengadaan *software* Articulate,

pengadaan *call center* BPPK, dan pengadaan aplikasi pendukung Kemenkeu Corpu Fun Quest.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja modal TA 2020 dapat dilihat pada Tabel 19, sedangkan perbandingan antara realisasi belanja modal TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal TA 2020

Akun	Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
5311	Belanja Modal Tanah	1.750.300.000	1.750.300.000	100,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.872.510.000	71.858.550.582	98,61
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.690.362.000	59.950.074.236	98,78
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0,00
5361	Belanja Modal Lainnya	2.781.362.000	2.781.276.659	100,00
5371	Belanja Modal BLU	-	-	0,00
	Jumlah Bruto	138.094.534.000	136.340.201.477	98,73
	Pengembalian Belanja		-	
	Jumlah Neto	138.094.534.000	136.340.201.477	98,73

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik (Turun)	% Naik (Turun)
5311	Belanja Modal Tanah	1.750.300.000	-	1.750.300.000	0,00%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.858.550.582	30.423.544.049	41.435.006.533	136,19%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.950.074.236	34.477.268.673	25.472.805.563	73,88%
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	216.124.062	(216.124.062)	-100,00%
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	2.781.276.659	627.223.000	2.154.053.659	343,43%
5371	Belanja Modal BLU	-	4.386.457.621	(4.386.457.621)	-100,00%
	Jumlah Bruto	136.340.201.477	70.130.617.405	66.209.584.072	94,41%
	Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00%
	Jumlah Neto	136.340.201.477	70.130.617.405	66.209.584.072	94,41%

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp1.750.300.000 dan Rp0. Belanja modal tanah ini digunakan untuk pembelian tanah yang berlokasi di Cirebon.

Adapun rincian transaksi Belanja Modal Tanah terdapat dalam lampiran Laporan Keuangan.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp71.858.550.582, mengalami peningkatan sebesar Rp41.435.006.533 atau 136,19% bila dibandingkan dengan TA 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terdapat pengadaan belanja modal peralatan dan mesin yang cukup signifikan, diantaranya: pengadaan peralatan yang mendukung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pengadaan pengembangan infrastruktur jaringan BPPK, pengadaan laptop untuk menunjang pelaksanaan *Flexible Working Space (FWS)* di lingkungan BPPK, pengadaan interior gedung pada PKN STAN, pengadaan perangkat akses kontrol PKN STAN, pengadaan kendaraan, dan beberapa pengadaan lainnya. Selain itu, terdapat juga belanja modal terkait penanganan COVID-19 berupa pembelian thermogun.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 21.

**Tabel 181. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2020 dan TA 2019**

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.385.953.483	30.423.544.049	131,35
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Penanganan Pandemi	1.356.338.099	-	0,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	116.259.000	-	0,00
	Jumlah Bruto	71.858.550.582	30.423.544.049	136,19
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00
	Jumlah Neto	71.858.550.582	30.423.544.049	136,19

Adapun transaksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat dalam lampiran Laporan Keuangan.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.950.074.236 dan Rp34.477.268.673. Terdapat peningkatan sebesar Rp25.472.805.563 atau 73,88%. Hal ini disebabkan tahun 2020 ini terdapat beberapa pengadaan belanja modal gedung dan bangunan yang cukup signifikan, diantaranya: pekerjaan jasa konsultan dan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Pendidikan PKN STAN; pekerjaan jasa konsultan dan

renovasi Gedung H Sekretariat Badan; pekerjaan jasa konsultan dan renovasi selasar gedung BDK Palembang; pekerjaan jasa konsultan, pengawas, dan konstruksi Asrama BDK Balikpapan; pekerjaan jasa konsultan perencana dan pekerjaan konstruksi renovasi atap dan lapangan BDK Manado; serta pekerjaan jasa konsultan dan konstruksi renovasi ruangan kelas Pusdiklat Bea Cukai. Selain itu, beberapa pengadaan belanja modal gedung dan bangunan di lingkungan BPPK adalah pekerjaan jasa konsultan konstruksi perencanaan pembangunan lanjutan gedung asrama dan pekerjaan renovasi ruang multimedia Pusdiklat Keuangan Umum; pengadaan jasa konsultan perencanaan renovasi asrama BDK Malang; dan pengadaan jasa konsultan perencanaan pekerjaan renovasi atap gedung BDK Pontianak.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan TA 2019

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.353.824.183	26.978.655.553	108,88
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3.596.250.053	7.498.613.120	-52,04
	Jumlah Bruto	59.950.074.236	34.477.268.673	73,88
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00
	Jumlah Neto	59.950.074.236	34.477.268.673	73,88

Adapun transaksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat dalam lampiran Laporan Keuangan.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp216.124.062. Tidak terdapat anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2020.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 23.

**Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
TA 2020 dan TA 2019**

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
534121	Belanja Modal Irigasi	-	-	0,00
534131	Belanja Modal Jaringan	-	183.700.000	-100,00
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	-	32.424.062	-100,00
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	-	-	0,00
	Jumlah Bruto	-	216.124.062	-100,00
	Pengembalian Belanja			
	Jumlah Neto	-	216.124.062	-100,00

*_

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.781.276.659 dan Rp627.223.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya digunakan untuk pengadaan *software* Microsoft Office, pengadaan *software* windows 10, pengadaan *software* PJJ, pengadaan *software knowledge management*, pengadaan *software* Articulate, pengadaan Call Center BPPK, dan pengadaan aplikasi pendukung Kemenkeu Corpu Fun Quest.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 24.

**Tabel 24. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA
2019**

Akun	Belanja Modal	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
536111	Belanja Modal Lainnya	2.781.276.659	627.223.000	343,43
	Jumlah Bruto	2.781.276.659	627.223.000	343,43
	Pengembalian Belanja	-	-	0,00
	Jumlah Neto	2.781.276.659	627.223.000	343,43

Adapun transaksi Belanja Modal Lainnya terdapat dalam lampiran Laporan Keuangan.

B.6 Belanja Badan Layanan Umum

Belanja Badan Layanan Umum di BPPK hanya dimiliki oleh PKN STAN. Realisasi Belanja BLU TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.126.701.640 dan Rp20.206.373.741. Realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp-18.079.672.101 atau -89,48% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan kegiatan kerjasama pendidikan dengan Pemerintah Daerah dan pelatihan brevet tertunda dan/atau dibatalkan karena adanya pandemi COVID-19, serta tidak adanya kegiatan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN tahun 2020.

Perbandingan antara realisasi Belanja BLU TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Belanja BLU TA 2020 dan TA 2019

Akun	Uraian Belanja	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	%
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	938.194.073	1.556.337.830	(39,72)
525112	Belanja Barang	149.291.252	2.766.525.306	(94,60)
525113	Belanja Jasa	961.415.963	7.217.054.812	(86,68)
525114	Belanja Pemeliharaan	-	-	-
525115	Belanja Perjalanan	77.800.352	4.204.794.172	(98,15)
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	-	75.204.000	(100,00)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	-	4.386.457.621	(100,00)
	Jumlah Bruto	2.126.701.640	20.206.373.741	(89,48)
	Pengembalian Belanja	-	-	-
	Jumlah Neto	2.126.701.640	20.206.373.741	(89,48)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Pada Badan Layanan Umum

*Kas Pada
Badan Layanan
Umum
Rp130.203.139.
070*

Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp130.203.139.070 dan Rp125.828.052.928 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, uang muka kerja maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Administrasi Keuangan BLU PKN STAN yang sumbernya berasal dari penerimaan kegiatan operasional BLU.

Rekonsiliasi Kas pada Badan Layanan Umum STAN per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Rekonsiliasi Kas pada Badan Layanan Umum

Uraian	31 Desember 2020
Kas dan Bank - BLU	60,203,139,070
Setara Kas Lainnya - BLU (Deposito)	70,000,000,000
Jumlah	130,203,139,070

Pada tanggal neraca, PKN STAN memiliki lima deposito berjangka, yaitu:

- Deposito berjangka 1 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 27 Desember 2018 senilai Rp 15.000.000.000 tingkat bunga awal sebesar 7,25%, yang telah berubah menjadi 4,75%, efektif per 27 Maret 2020;
- Deposito berjangka 3 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 27 Desember 2018 senilai Rp 13.000.000.000 tingkat bunga awal sebesar 7,25%, yang telah berubah menjadi 4,75%, efektif per 27 Maret 2020;
- Deposito Berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp 10.000.000.000 tingkat bunga 3,57% (per Desember 2020);
- Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp 16.000.000.000 tingkat bunga 3,57% (per Desember 2020);
- Deposito Berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp 16.000.000.000 tingkat bunga 3,57% (per Desember 2020).

Belanja Dibayar
Di Muka
Rp0

C.2 Belanja Dibayar Di Muka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Di Muka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp27.099.208. Belanja dibayar di muka (*Prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada tahun 2020 tidak terdapat belanja dibayar dimuka, sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat belanja dibayar dimuka yang berasal dari jaminan pelaksanaan pekerjaan pada pekerjaan renovasi lobby dan jasa konsultan ANDALALIN pada Pusdiklat Keuangan Umum.

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp65.432.981

C.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp65.432.981 dan Rp22.246.575. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada Tabel 27.

**Tabel 27. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
per 31 Desember 2020**

Satuan Kerja	Uraian	Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Rp)
BPPK Pusat	Sewa tanah dan bangunan mesin ATM (1 bulan)	1,916,125
PKN STAN	Jaminan Uang Muka Pelaksanaan Pengecatan-PT Tambun Jaya Persada	47,833,078
PKN STAN	pendapatan bunga deposito di BTN periode 28 – 31 Desember 2020 (Deposito BTN - 0004401400077172)	7,808,219
PKN STAN	pendapatan bunga deposito di BTN periode 28 – 31 Desember 2020 (Deposito BTN - 0004401400077180)	6,767,123
Pusdiklat Pajak	Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Selasar 2020-PT Anagata Cemerlang Indah	1,108,436
		65,432,981

Piutang Bukan
Pajak
Rp812.516.442

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp812.516.442 dan Rp1.048.961.698. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)
BPPK Pusat	CV Kautsar	7,219,940
Pusdiklat PSDM	Asuransi Raya	24,888,600
Pusdiklat PSDM	PT Kadita Berseri	25,000,000
Pusdiklat KNPk	PT Grahacipta Ramapratama	52,936,203
PKN STAN	CV Putra Mahakam Kalisamarinda	60,245,022
BDK Pekanbaru	CV Srikandi	411,146,280
BDK Manado	PT Paringgawana Bumijaya	214,314,399
BDK Manado	CV Sinar	14,639,598
BDK Manado	Adenan H.	2,126,400
		812,516,442

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.900.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR a.n. Ilham Muhammad Fauzan sudah selesai dilunasi pada bulan Mei 2020, berdasarkan Surat Keterangan Lunas Nomor KET-15/BPP.04/2020 tanggal 27 Mei 2020.

Piutang dari
Kegiatan
Operasional
Badan Layanan
Umum
Rp290.350.000

C.6 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp290.350.000 dan Rp290.350.000. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional

Badan Layanan Umum per 31 Desember 2020

No.	Debitur	Jumlah (Rp)
1	Mahasiswa Prodip I OC PBB	290.350.000
	Jumlah	290.350.000

Piutang dari
Kegiatan Non
Operasional
Badan Layanan
Umum
Rp467.335.113

C.7 Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp467.335.113 dan Rp467.335.113. Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2020

No.	Debitur	Jumlah (Rp)
1	PT Sarana Karja Jasa (sudah dilimpahkan)	286.664.703
2	PT Nugraha Adi Taruna (sudah dilimpahkan)	180.670.410
	Jumlah	467.335.113

Piutang dari PT Sarana Karya Jasa yang telah dikategorikan macet, proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V (KPKNL-V), sesuai dengan surat pelimpahan yang telah diajukan BLU STAN kepada KPKNL-V dengan Surat Nomor S-036/AK.1/2012 tanggal 26 Maret 2012. Begitu pula dengan piutang dari PT Nugraha Adi Taruna, proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Banten, sesuai dengan surat PUPN Cabang Banten Nomor SP3N-4/PUPNC.14.03/2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp1.570.201.555

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.570.201.555 dan Rp1.571.398.282. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	812,516,442	100%	812,516,442
Jumlah	812,516,442		812,516,442
Piutang Kegiatan Operasional BLU			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	290,350,000	100%	290,350,000
Jumlah	290,350,000		290,350,000
Piutang Kegiatan Non Operasional BLU			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	467,335,113	100%	467,335,113
Jumlah	467,335,113		467,335,113
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih			1,570,201,555

Persediaan
Rp7.358.542.172
2

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp7.358.542.172 dan Rp4.891.758.278. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 32. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tabel 32. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Barang Konsumsi	6.171.405.903	4.057.894.963
Barang Untuk Pemeliharaan	461.130.566	397.296.505
Suku Cadang	-	16.514.028
Persediaan Lainnya	726.005.703	420.052.782
Jumlah	7.358.542.172	4.891.758.278

Tanah
Rp5.849.019.335.000

C.10 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPPK per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yaitu masing-masing sebesar Rp5.849.019.335.000 dan Rp5.847.269.035.000. Mutasi tanah berasal dari pembelian tanah oleh Sekretariat BPPK di Cirebon senilai Rp1.750.300.000.

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan
Mesin
Rp396.909.249.593

C.11 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp396.909.249.593 dan Rp369.324.202.207. Mutasi nilai peralatan dan mesin disajikan pada Tabel 33. Selanjutnya, rincian mutasi tambah atas nilai peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian, transfer masuk, reklasifikasi masuk, pengembangan nilai aset (langsung), dan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan, masing-masing dapat dilihat pada Tabel 33 sampai dengan Tabel 44.

Adapun rincian mutasi kurang atas nilai peralatan dan mesin yang berasal dari transfer keluar, reklasifikasi keluar, koreksi pencatatan, dan penghentian aset dari penggunaan, secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 45 sampai dengan Tabel 49.

Daftar BMN peralatan dan mesin disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 33. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	369.324.202.207
Penambahan :	
Koreksi Saldo Awal	1.072.298.250
Pembelian	69.431.008.334
Transfer Masuk	13.208.109.288
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.438.898.000
Reklasifikasi Masuk	667.806.302
Perolehan Lainnya	1.526.797.287
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	730.742.278
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.700.000
Pengembangan Melalui KDP	14.150.000
Koreksi Manual	866.250
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.836.433.166
Jumlah	89.932.809.155

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	369.324.202.207
Pengurangan	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-13.484.500
Transfer Keluar	-13.208.109.288
Reklasifikasi Keluar	-628.538.302
Koreksi Pencatatan	-2.136.800.565
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-46.360.829.114
Jumlah	-62.347.761.769
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	396.909.249.593
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-273.320.251.312
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020	123.588.998.281

Tabel 34. Koreksi Saldo Awal

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT RUMAH TANGGA	94	1.072.298.250
	TOTAL	94	1.072.298.250

Tabel 35. Pembelian

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	35	209.334.753
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	2.142.000.000
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	16	65.976.902
4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1	4.367.000
5	ALAT BENGKEL BERMESIN	9	27.197.221
6	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	41	66.410.000
7	ALAT UKUR	6	25.618.800
8	ALAT PENGOLAHAN	6	30.968.728
9	ALAT KANTOR	674	5.305.751.200
10	ALAT RUMAH TANGGA	2.620	14.682.562.295
11	ALAT STUDIO	1.730	11.599.674.554
12	ALAT KOMUNIKASI	28	74.702.800
13	PERALATAN PEMANCAR	3	105.154.720
14	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	3	3.624.800
15	ALAT KEDOKTERAN	29	150.212.500
16	ALAT KESEHATAN UMUM	2	10.528.000
17	UNIT ALAT LABORATORIUM	43	444.327.387
18	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	9	24.266.000
19	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1	2.700.005
20	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	2	11.790.000
21	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	46.414.000
22	KOMPUTER UNIT	1.203	18.909.366.443
23	PERALATAN KOMPUTER	788	15.218.591.126
24	ALAT SAR	12	102.740.000
25	ALAT KERJA PENERBANGAN	7	32.430.000
26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	3.312.700
27	PERALATAN OLAH RAGA	21	130.986.400
	TOTAL	7.304	69.431.008.334

Tabel 36. Transfer Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	23	2.889.125.224
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	977.100.000
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	13.455.000
4	ALAT KANTOR	305	1.019.792.806
5	ALAT RUMAH TANGGA	1.607	2.901.994.102
6	ALAT STUDIO	75	1.060.121.260
7	ALAT KOMUNIKASI	1	28.583.500
8	KOMPUTER UNIT	126	2.462.472.586
9	PERALATAN KOMPUTER	50	1.840.504.810
10	PERALATAN OLAH RAGA	2	14.960.000
TOTAL		2.199	13.208.109.288

Tabel 37. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	KOMPUTER UNIT	88	1.438.898.000
TOTAL		88	1.438.898.000

Tabel 38. Reklasifikasi Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	1	39.268.000
2	ALAT RUMAH TANGGA	14	124.071.115
3	ALAT STUDIO	1	37.119.000
4	ALAT KEDOKTERAN	9	19.964.999
5	ALAT KESEHATAN UMUM	1	8.800.000
6	KOMPUTER UNIT	33	438.583.188
TOTAL		59	667.806.302

Tabel 39. Perolehan Lainnya

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT PENGOLAHAN	1	1.122.000
2	ALAT KANTOR	30	1.513.312.787
3	ALAT STUDIO	1	1.962.500
4	PERALATAN KOMPUTER	2	10.400.000
TOTAL		34	1.526.797.287

Tabel 40. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	1	109.329.000
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMO	2	8.863.278
3	ALAT KANTOR	1	5.700.000
4	ALAT RUMAH TANGGA	182	577.420.000
5	ALAT KOMUNIKASI	1	6.930.000
6	KOMPUTER UNIT	6	10.300.000
7	PERALATAN KOMPUTER	6	12.200.000
TOTAL		199	730.742.278

Tabel 41. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT KANTOR	1	5.700.000
TOTAL		1	5.700.000

Tabel 42. Pengembangan Melalui KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT STUDIO	1	9.550.000
2	KOMPUTER UNIT	1	4.600.000
TOTAL		2	14.150.000

Tabel 43. Koreksi Manual

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT RUMAH TANGGA	12	-
2	ALAT KOMUNIKASI	5	866.250
TOTAL		17	866.250

Tabel 44. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	198.077.000
2	ALAT KANTOR	137	221.883.124
3	ALAT RUMAH TANGGA	379	989.721.490
4	ALAT STUDIO	10	5.535.000
5	ALAT KOMUNIKASI	1	222.156.000
6	PERALATAN PEMANCAR	7	20.596.000
7	UNIT ALAT LABORATORIUM	9	32.219.552
8	KOMPUTER UNIT	3	38.445.000
9	PERALATAN OLAH RAGA	1	107.800.000
TOTAL		548	1.836.433.166

Tabel 45. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT PENGOLAHAN	1	-1.122.000
2	ALAT STUDIO	1	-1.962.500
3	PERALATAN KOMPUTER	1	-10.400.000
TOTAL		3	-13.484.500

Tabel 46. Transfer Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	23	-2.889.125.224
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	-977.100.000
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	-13.455.000
4	ALAT KANTOR	305	-1.019.792.806
5	ALAT RUMAH TANGGA	1.607	-2.901.994.102
6	ALAT STUDIO	75	-1.060.121.260
7	ALAT KOMUNIKASI	1	-28.583.500
8	KOMPUTER UNIT	126	-2.462.472.586
9	PERALATAN KOMPUTER	50	-1.840.504.810
10	PERALATAN OLAH RAGA	2	-14.960.000
TOTAL		2.199	-13.208.109.288

Tabel 47. Reklasifikasi Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT RUMAH TANGGA	5	-86.527.115
2	ALAT STUDIO	1	-2.794.000
3	ALAT KEDOKTERAN	1	-8.800.000
4	UNIT ALAT LABORATORIUM	36	-432.766.387
5	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	6	-15.290.000
6	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	-37.119.000
7	KOMPUTER UNIT	2	-17.201.800
8	ALAT KERJA PENERBANGAN	6	-28.040.000
TOTAL		58	-628.538.302

Tabel 48. Koreksi Pencatatan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	-198.077.000
2	ALAT KANTOR	77	-1.460.550.492
3	ALAT RUMAH TANGGA	71	-413.152.032
4	ALAT STUDIO	2	-13.085.489
5	PERALATAN PEMANCAR	7	-20.596.000
6	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	-31.339.552
TOTAL		166	-2.136.800.565

Tabel 49. Penghentian Aset Dari Penggunaan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	48	-183.289.024
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	16	-1.839.069.780
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	25	-30.424.541
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	-9.369.000
5	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	-12.141.000
6	ALAT KANTOR	1.602	-7.345.901.277
7	ALAT RUMAH TANGGA	13.298	-16.085.915.916
8	ALAT STUDIO	1.298	-3.633.258.121
9	ALAT KOMUNIKASI	128	-468.078.659
10	PERALATAN PEMANCAR	6	-71.216.364
11	ALAT KEDOKTERAN	28	-23.459.800
12	ALAT KESEHATAN UMUM	12	-4.661.800
13	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	-1.702.000
14	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	-5.060.000
15	KOMPUTER UNIT	1.337	-13.385.022.774
16	PERALATAN KOMPUTER	648	-3.027.340.257
17	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	-920.000
18	ALAT SAR	3	-1.274.520
19	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	-1.084.000
20	PERALATAN OLAH RAGA	22	-231.640.281
TOTAL		18.487	-46.360.829.114

C.12 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp982.587.912.640 dan Rp994.437.240.481.

Gedung dan
Bangunan
Rp982.587.912.
640

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 50, sedangkan rincian mutasi tambah dan kurangnya dapat dilihat pada Tabel 51 sampai dengan Tabel 61. Adapun daftar BMN Gedung dan Bangunan disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 50. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2019	994.437.240.481
Penambahan :	
Pembelian	29.038.055
Transfer Masuk	88.684.538.301
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	329.929.183
Pengembangan Melalui KDP	3.323.525.153
Koreksi Manual	3.394.322.018
Jumlah	95.761.352.710
Pengurangan	
Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Ditemukan	-259.391.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-1.072.298.250
Transfer Keluar	-88.684.538.301
Reklasifikasi Keluar	-39.268.000
Koreksi Pencatatan	-385.651.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-17.169.534.000
Jumlah	-107.610.680.551
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	982.587.912.640
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-111.867.632.213
Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020	870.720.280.427

Tabel 51. Pembelian

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	29.038.055
	TOTAL	1	29.038.055

Tabel 52. Transfer Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18	22.113.554.501
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	66.464.067.800
3	TUGU/TANDA BATAS	1	106.916.000
	TOTAL	22	88.684.538.301

Tabel 53. Pengembangan Nilai Aset (Langsung)

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	289.449.183
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	40.480.000
	TOTAL	4	329.929.183

Tabel 54. Pengembangan Melalui KDP

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	2.836.558.764
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	486.966.389
TOTAL		7	3.323.525.153

Tabel 55. Koreksi Manual

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	14	3.394.322.018
TOTAL		14	3.394.322.018

Tabel 56. Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Ditemukan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	-259.391.000
TOTAL		1	-259.391.000

Tabel 57. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11	-738.477.000
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	9	-333.821.250
TOTAL		20	-1.072.298.250

Tabel 58. Transfer Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18	-22.113.554.501,00
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3	-66.464.067.800,00
3	TUGU/TANDA BATAS	1	-106.916.000,00
TOTAL		22	-88.684.538.301,00

Tabel 59. Reklasifikasi Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	-39.268.000
TOTAL		1	-39.268.000

Tabel 60. Koreksi Pencatatan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	-137.584.000,00
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	-248.067.000,00
TOTAL		2	-385.651.000,00

Tabel 61. Penghentian Aset Dari Penggunaan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11	-4.174.809.000
2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	11	-12.433.912.000
3	TUGU/TANDA BATAS	3	-560.813.000
TOTAL		25	-17.169.534.000

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Rp34.618.548.8
64

C.13 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp34.618.548.864 dan Rp38.102.707.911.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 61, sedangkan rincian mutasi tambah dan mutasi kurangnya dapat dilihat pada Tabel 62 sampai dengan Tabel 65. Adapun daftar BMN Jalan, Irigasi, dan jaringan disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 61. Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2019	38.102.707.911
Penambahan :	
Transfer Masuk	322.773.990
Jumlah	322.773.990
Pengurangan	
Transfer Keluar	-322.773.990
Koreksi Pencatatan	-2.645.907.434
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-838.251.613
Jumlah	-3.806.933.037
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020	34.618.548.864
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-12.847.762.267
Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020	21.770.786.597

Tabel 62. Transfer Masuk

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	94.930.000
2	JARINGAN LISTRIK	2	227.843.990
TOTAL		3	322.773.990

Tabel 63. Transfer Keluar

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	-94.930.000
2	JARINGAN LISTRIK	2	-227.843.990
TOTAL		3	-322.773.990

Tabel 64. Koreksi Pencatatan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	JARINGAN LISTRIK	5	-2.645.907.434
TOTAL		5	-2.645.907.434

Tabel 65. Penghentian Aset Dari Penggunaan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	-11.767.400
2	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	-96.965.400
3	INSTALASI LAIN	61	-640.914.595
4	JARINGAN TELEPON	5	-88.604.218
TOTAL		69	-838.251.613

Aset Tetap
Lainnya
Rp11.840.125.0
89

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.840.125.089 dan Rp15.658.221.460.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 66.

Tabel 66. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2019	15.658.221.460
Penambahan :	
Pembelian	262.572.980
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	8.085.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	13.085.489
Koreksi Manual	84.985.080
Jumlah	368.728.549
Pengurangan :	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-4.186.824.920
Jumlah	-4.186.824.920
Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	11.840.125.089
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-261.369.624
Nilai Buku Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020	11.578.755.465

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sesuai penjelasan sebagai berikut:

- a. pembelian berupa Barang Perpustakaan Tercetak sejumlah 17 unit senilai Rp25.665.980 dan Barang Bercorak Kesenian sejumlah 12 unit senilai Rp236.907.000;
- b. pengembangan aset langsung Barang Bercorak Kesenian sejumlah 1 unit senilai Rp8.085.000;
- c. koreksi pencatatan nilai bertambah berupa Barang Bercorak Kesenian sejumlah 2 unit senilai Rp13.085.489; dan
- d. koreksi manual terhadap nilai monografi pada PKN STAN sebesar Rp84.985.080.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya yang berasal dari penghentian aset dari penggunaan dapat dilihat pada Tabel 67. Adapun daftar BMN Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 67. Penghentian Aset dari Penggunaan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	90.091	-3.624.824.990
2	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	10	-507.444.050
3	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	3	-4.499.880
4	BARANG BERCORAK KESENIAN	19	-48.621.000
5	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	1	-1.435.000
TOTAL		90.124	-4.186.824.920

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp73.567.366.7
57

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp73.567.366.757 dan Rp17.325.032.827 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung Pendidikan PKN STAN sebesar Rp60.840.563.515;
- b. Jasa konsultan Renovasi Guesthouse Pusdiklat Bea dan Cukai sebesar Rp75.680.000;
- c. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan Gedung Asrama Pusdiklat Keuangan Umum sebesar Rp12.387.083.950;
- d. Renovasi lobby Pusdiklat Keuangan Umum sebesar Rp118.188.792;

- e. Jasa konsultan Perencanaan Renovasi Asrama C BDK Malang sebesar Rp79.460.000;
- f. Renovasi atap Asrama BDK Pontianak sebesar Rp37.015.000;
- g. Grand Design BDK Denpasar sebesar Rp29.375.500;
- Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 68. Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	JENIS KDP	SALDO 1 JANUARI 2020 (Rp)	MUTASI (Rp)		SALDO 31 DESEMBER 2020 (Rp)
			TAMBAH	KURANG	
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	1.596.760.295	-1.596.760.295	0
3	Gedung dan Bangunan	17.325.032.827	59.591.106.998	-3.348.773.068	73.567.366.757
4	J I J	0	0	0	0
5	ATL	0			0
JUMLAH		17.325.032.827	61.187.867.293	-4.945.533.363	73.567.366.757

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(392.424.466
.903)

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(392.424.466.903) dan Rp(363.467.532.048).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 69, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 69. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Rincian	Desember 2020 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku Setelah Penyusutan (Rp)
1	Tanah	5.849.019.335.000	0	5.849.019.335.000
2	Peralatan dan Mesin	396.909.249.593	-273.320.251.312	123.588.998.281
3	Gedung dan Bangunan	982.587.912.640	-105.995.083.700	876.592.828.940
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.618.548.864	-12.847.762.267	21.770.786.597
5	Aset Tetap Lainnya	11.755.140.009	-261.369.624	11.493.770.385
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.567.366.757	0	73.567.366.757
7	Aset Tetap Belum Diregister	0	0	0
Jumlah		7.348.457.552.863	-392.424.466.903	6.956.033.085.960

Piutang
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
Rp1.419.843.783

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.419.843.783 dan Rp1.402.342.642. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 70. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR 31 Desember 2020

No	Nama	31 Desember 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
1	Jolomebath	5,000,000	Macet
2	Hartadi Sutomo	63,900,000	Macet
3	Petrus P. S. Depari	1,249,789,237	Macet
4	Danu Nugroho	25,500,000	Macet
5	Ryandi Aditya	21,000,000	Macet
6	Setyo Utomo	34,654,546	Macet
7	Dwi Wulandari	20,000,000	Macet
Jumlah		1,419,843,783	

Perubahan Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dikarenakan perubahan kurs untuk TP/TGR a.n. Petrus P. S. Depari per 31 Desember 2020.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
TP/TGR Jangka
Panjang
Rp1.419.843.783

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.419.843.783 dan Rp1.402.342.642. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 71.

Tabel 71. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR Jangka Panjang 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	1.419.843.783	100%	1.419.843.783
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 1.419.843.783		Rp 1.419.843.783

Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp925.823.061

C.19 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp925.823.061 dan Rp1.110.987.674. Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya dapat dilihat pada Tabel 72.

Tabel 72. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2020

No	Nama	31 Desember 2020 (Rp)	Kualitas Piutang
1	PT Handa Panca Sakti	925.823.061	Lancar
Jumlah		925.823.061	

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan hasil temuan dari Pemeriksaan oleh BRK-RI Tahun Anggaran 2018 No. 65.c/LHP/XV/04/2019 tanggal 26 April 2019 pada Satuan Kerja Pusdiklat PSDM untuk pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2018.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp(4.629.115)

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp(4.629.115) dan Rp(5.554.938). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 73.

Tabel 73. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Piutang Jangka Panjang Lainnya			
Lancar	925.823.061	0,50%	(4.629.115)
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	925.823.061		(4.629.115)

Aset Tak Berwujud
Rp5.262.041.938

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp5.262.041.938 dan Rp9.000.979.584. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud per tanggal pelaporan dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 74. Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2019	9.000.979.584
Penambahan :	
Pembelian	2.497.533.190
Transfer Masuk	438.080.685
Jumlah	2.935.613.875
Pengurangan :	
Transfer Keluar	-438.080.685
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-6.236.470.836
Jumlah	-6.674.551.521
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020	5.262.041.938
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-2.116.393.681
Nilai Buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020	3.145.648.257

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 75.

Tabel 75. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software	4.122.960.938
2	Lisensi	287.936.000
3	ATB Lainnya	851.145.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		5.262.041.938
Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020		-2.116.393.681
Jumlah Nilai Buku per 31 Desember 2020		3.145.648.257

Aset Lain-Lain
Rp23.893.003.272

C.22 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp23.893.003.272 dan Rp23.751.388.112. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain terdiri dari:

1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp22.860.238.288;
2. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp1.032.764.984.

Adapun uraian mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 76, sedangkan rincian reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel 77.

Tabel 76. Mutasi Nilai Aset Lain-lain

Saldo per 31 Desember 2019	23.751.388.112
Penambahan :	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	74.791.910.483
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	38.445.000
Jumlah	74.830.355.483
Pengurangan	
Penghapusan	-12.932.244.908
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-1.836.433.166
Koreksi Manual	-84.985.080
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-59.835.077.169
Jumlah	-74.688.740.323
Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020	23.893.003.272
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-22.703.806.794
Nilai Buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2020	1.189.196.478

Tabel 77. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	48	183.289.024
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	16	1.839.069.780
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	25	30.424.541
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	9.369.000
5	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3	12.141.000
6	ALAT KANTOR	1.602	7.345.901.277
7	ALAT RUMAH TANGGA	13.298	16.085.915.916
8	ALAT STUDIO	1.298	3.633.258.121
9	ALAT KOMUNIKASI	128	468.078.659
10	PERALATAN PEMANCAR	6	71.216.364
11	ALAT KEDOKTERAN	28	23.459.800
12	ALAT KESEHATAN UMUM	12	4.661.800
13	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	1.702.000
14	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA	4	5.060.000
15	KOMPUTER UNIT	1.337	13.385.022.774
16	PERALATAN KOMPUTER	648	3.027.340.257
17	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	920.000
18	ALAT SAR	3	1.274.520
19	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	1.084.000
20	PERALATAN OLAH RAGA	22	231.640.281
21	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	11	4.174.809.000
22	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	11	12.433.912.000
23	TUGU/TANDA BATAS	3	560.813.000
24	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	11.767.400
25	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	96.965.400
26	INSTALASI LAIN	61	640.914.595
27	JARINGAN TELEPON	5	88.604.218
28	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	90.091	3.624.824.990
29	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BEN	10	507.444.050
30	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	3	4.499.880
31	BARANG BERCORAK KESENIAN	19	48.621.000
32	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	1	1.435.000
33	ASET TAK BERWUJUD	44	2.000.072.903
34	ASET TAK BERWUJUD	11	4.236.397.933
TOTAL		108.760	74.791.910.483

Tabel 78. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT RUMAH TANGGA	2	-
2	KOMPUTER UNIT	3	38.445.000
TOTAL		5	38.445.000

Mutasi kurang Aset Lain-Lain dan rincian barang yang akan dihapuskan dapat dilihat pada Tabel 78 dan Tabel 79. Koreksi manual berasal dari koreksi kurang nilai monografi pada PKN STAN sebesar Rp84.985.080. Adapun rincian Aset Lain-Lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada lampiran.

Tabel 79. Penghapusan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	52	0
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	17	0
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	-7.691.635
4	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	26	-12.199.000
5	ALAT UKUR	50	0
6	ALAT KANTOR	259	-1.076.467.788
7	ALAT RUMAH TANGGA	4.119	-2.570.742.242
8	ALAT STUDIO	770	-398.044.250
9	ALAT KOMUNIKASI	23	-146.469.400
10	PERALATAN PEMANCAR	4	-36.565.000
11	ALAT KEDOKTERAN	0	-19.298.400
12	ALAT KESEHATAN UMUM	12	0
13	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	0
14	PERALATAN LABORATORIUM	18	-3.503.500
15	KOMPUTER UNIT	1.052	-518.175.761
16	PERALATAN KOMPUTER	497	-276.549.948
17	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	0
18	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	-4.510.000
19	PERALATAN OLAH RAGA	13	0
20	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7	-4.250.629.000
21	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	16	-1.516.128.000
22	TUGU/TANDA BATAS	3	-560.813.000
23	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	0
24	INSTALASI LAIN	1	0
25	JARINGAN TELEPON	1	0
26	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	69.628	-281.511.718
27	BARANG BERCORAK KESENIAN	1	0
28	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	-500.000
29	ASET TAK BERWUJUD	32	-1.252.446.266
30	ASET TAK BERWUJUD	7	0
TOTAL		76.617	-12.932.244.908

Tabel 80. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	-198.077.000
2	ALAT KANTOR	137	-221.883.124
3	ALAT RUMAH TANGGA	379	-989.721.490
4	ALAT STUDIO	10	-5.535.000
5	ALAT KOMUNIKASI	1	-222.156.000
6	PERALATAN PEMANCAR	7	-20.596.000
7	UNIT ALAT LABORATORIUM	9	-32.219.552
8	KOMPUTER UNIT	3	-38.445.000
9	PERALATAN OLAH RAGA	1	-107.800.000
TOTAL		548	-1.836.433.166

Tabel 81. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

No	Barang	Unit	Nilai (Rp)
1	ALAT BANTU	50	-183.992.080
2	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	20	-1.558.275.640
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	10	-17.778.941
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	3	-9.369.000
5	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	24	-12.498.500
6	ALAT KANTOR	610	-6.825.390.414
7	ALAT RUMAH TANGGA	6.669	-11.982.992.623
8	ALAT STUDIO	989	-3.657.505.082
9	ALAT KOMUNIKASI	55	-328.037.205
10	PERALATAN PEMANCAR	5	-7.586.364
11	ALAT KEDOKTERAN	5	-13.362.800
12	ALAT KESEHATAN UMUM	12	-4.661.800
13	UNIT ALAT LABORATORIUM	3	-1.702.000
14	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	-5.060.000
15	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAM	18	-66.566.500
16	KOMPUTER UNIT	996	-11.245.571.736
17	PERALATAN KOMPUTER	563	-3.179.893.608
18	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	-920.000
19	ALAT SAR	3	-1.274.520
20	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	-1.084.000
21	PERALATAN OLAH RAGA	21	-19.040.281
22	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	4	-250.112.000
23	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	7	-10.917.784.000
24	TUGU/TANDA BATAS	3	0
25	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	2	-11.767.400
26	INSTALASI GARDU LISTRIK	1	-96.965.400
27	INSTALASI LAIN	2	-43.951.149
28	JARINGAN TELEPON	3	-80.783.875
29	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	80.458	-3.605.816.035
30	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	3	-4.499.880
31	BARANG BERCORAK KESENIAN	2	-4.500.000
32	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	0
33	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	1	-1.435.000
34	ASET TAK BERWUJUD	35	-1.458.501.403
35	ASET TAK BERWUJUD	11	-4.236.397.933
TOTAL		90.595	-59.835.077.169

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp24.820.200.4
75

C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp24.820.200.475 dan Rp25.662.932.204. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya dapat dilihat pada Tabel 80.

Tabel 80. Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No	Rincian	31 Desember 2020 (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku Setelah Penyusutan (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	5.262.041.938	-2.116.393.681	3.145.648.257
2	Aset Lain-Lain	23.977.988.352	-22.703.806.794	1.274.181.558
	Jumlah	29.240.030.290	-24.820.200.475	4.419.829.815

Utang kepada Pihak Ketiga Rp847.400.537,78

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp847.400.537,78 dan Rp1.086.643.866. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang yang masih harus dibayar. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada Tabel 81.

Tabel 81. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	31.132.127,00	27.421.181,00	13,53
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	816.268.410,78	1.052.761.882,00	(22,46)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	6.460.803,00	(100,00)
Jumlah	847.400.537,78	1.086.643.866,00	(22,02)

Pendapatan Diterima di Muka Rp73.624.470

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp73.624.470 dan Rp121.969.161. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima/disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Tabel 82. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	6.711.958	68.768.501	(90,24)
Pendapatan Diterima di Muka BLU	66.912.512	53.200.660	25,77
Jumlah	73.624.470	121.969.161	(39,64)

Ekuitas Rp7.098.080.198.936,22

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.098.080.198.936,22 dan Rp6.863.778.959.753. Ekuitas

merupakan kekayaan bersih entitas berupa selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas dapat dilihat pada catatan E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp7.959.354.145

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.959.354.145 dan Rp51.264.300.055. Perbandingan rincian PNBP untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 83.

Tabel 83. Perbandingan Rincian PNBP 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	969.700.000	34.808.910.002	(97,21)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	49.000.000	247.000.000	(80,16)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	573.000.000	5.713.535.000	(89,97)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.792.023.699	5.625.314.394	(14,81)
Pendapatan Lain-lain BLU	-	2.199.000	(100,00)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	13.630.000	-	
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	59.125.998	247.483.270	(76,11)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	23.925.000	-	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	2.700.000	-	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	141.182.354	260.022.310	(45,70)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	3.200.000	45.100.000	(92,90)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	816.000.000	1.866.000.000	(56,27)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	417.000.000	962.800.000	(56,69)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	41.234.016	189.210.954	(78,21)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	57.633.078	1.296.725.125	(95,56)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	7.959.354.145	51.264.300.055	(84,47)

Pendapatan-LO periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp43.304.945.910 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan tidak diselenggarakannya kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PKN STAN, yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan di tahun 2019. Selain itu, terjadinya pandemi COVID-19 juga mengakibatkan tertunda atau batalnya kegiatan yang menyumbang pendapatan lainnya, seperti pelatihan kerja sama, brevet, sertifikasi ahli kepabeanan,

termasuk juga sewa BMN berupa gedung dan bangunan.

Beban Pegawai
Rp93.908.288.434

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp93.908.288.434 dan Rp91.224.666.420. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan aturan undang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 84. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	64.697.349.086	63.204.135.706	2,36
Beban Pembulatan Gaji PNS	944.205	1.053.226	(10,35)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4.721.745.046	4.574.188.436	3,23
Beban Tunj. Anak PNS	1.395.451.758	1.341.749.118	4,00
Beban Tunj. Struktural PNS	1.830.867.500	1.904.572.500	(3,87)
Beban Tunj. Fungsional PNS	3.307.525.000	3.180.825.000	3,98
Beban Tunj. PPh PNS	194.604.538	203.384.355	(4,32)
Beban Tunj. Beras PNS	3.260.058.781	3.194.486.240	2,05
Beban Uang Makan PNS	11.196.564.400	9.546.375.950	17,29
Beban Tunjangan Umum PNS	2.285.040.850	2.319.317.500	(1,48)
Beban Uang Lembur	86.404.000	198.118.000	(56,39)
Beban Gaji dan Tunjangan	931.733.270	1.556.460.389	(40,14)
Jumlah	93.908.288.434	91.224.666.420	2,94

Secara umum, beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,94% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai BPPK, adanya kenaikan pangkat/golongan pegawai, dan kenaikan gaji berkala. Selain itu, dengan adanya kebijakan selektif dalam melakukan perjalanan dinas, maka sangat sedikit pegawai yang melakukan perjalanan dinas, hal ini berdampak pada meningkatnya beban uang makan PNS. Disisi lain, adanya kebijakan FWS menyebabkan turunnya beban uang lembur. Menurunnya pendapatan BLU PKN STAN menyebabkan perubahan pembayaran honor

PPNP yang semula menggunakan akun belanja gaji dan tunjangan menjadi akun belanja keperluan perkantoran.

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp6.430.940.135

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.430.940.135 dan Rp17.910.653.228.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 85.

Tabel 85. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	5.649.368.884	17.090.077.349	(66,94)
Beban Persediaan Lainnya	781.571.251	820.575.879	(4,75)
Jumlah Beban Persediaan	6.430.940.135	17.910.653.228	(64,09)

Beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 turun sebesar 64,09% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan telah diterapkannya *office automation* secara penuh pada tahun 2020. Selain itu, adanya pandemi *COVID-19* menyebabkan sebagian besar pegawai melaksanakan WFH serta perubahan metode pelaksanaan diklat klasikal menjadi *e-learning* dan Pembelajaran Jarak Jauh, sehingga tidak banyak menggunakan persediaan.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa
Rp184.084.689.445

Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp184.084.689.445 dan Rp333.666.413.679.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan

Jasa untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 86.

Tabel 86. Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	35.908.298.699	33.261.170.532	7,96
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.970.200	-	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	174.222.996	589.880.244	(70,46)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	3.605.547.000	3.964.485.000	(9,05)
Beban Barang Operasional Lainnya	3.125.265.674	3.511.591.009	(11,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2.369.199.044	-	
Beban Bahan	14.162.315.092	67.558.176.402	(79,04)
Beban Honor Output Kegiatan	482.545.000	1.705.585.000	(71,71)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	70.578.850.569	114.989.229.961	(38,62)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1.236.544.658	-	
Beban Langganan Listrik	9.029.878.680	13.580.244.972	(33,51)
Beban Langganan Telepon	111.450.768	155.685.321	(28,41)
Beban Langganan Air	353.277.800	706.498.946	(50,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	6.240.000	(100,00)
Beban Jasa Pos dan Giro	790.000	-	
Beban Jasa Konsultan	1.569.323.250	59.840.000	2.522,53
Beban Sewa	3.713.494.810	30.902.854.025	(87,98)
Beban Jasa Profesi	30.433.793.980	37.982.559.033	(19,87)
Beban Jasa Lainnya	5.285.739.519	14.369.182.716	(63,21)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	710.349.327	-	
Beban Barang	149.291.252	2.766.525.306	(94,60)
Beban Jasa	961.415.963	7.217.054.812	(86,68)
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	-	75.204.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	113.125.164	264.406.400	(57,22)
Jumlah Beban Barang dan Jasa	184.084.689.445	333.666.413.679	(44,83)

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 44,83% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pandemi *COVID-19* yang secara langsung berpengaruh terhadap proses bisnis utama di BPPK, yaitu penyelenggaraan layanan pembelajaran. Pada triwulan II, diklat klasikal mulai dialihkan pelaksanaannya menjadi *e-learning* dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) serta ada pula yang ditunda, sehingga untuk belanja terkait penyelenggaraan pembelajaran berkurang sangat banyak yang secara langsung berpengaruh terhadap bebannya. Adapun perubahan/penundaan pelaksanaan kegiatan lainnya (rapat, SPMB) menjadi penyumbang turunnya beban barang dan jasa. Sedangkan beban jasa konsultan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena terdapat kegiatan di PKN STAN berupa kegiatan jasa konsultasi organisasi dan manajemen terkait transformasi kelembagaan.

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, BPPK melakukan belanja untuk pembelian *hand sanitizer*, pembelian APD, penyemprotan, masker, cairan disinfektan, rapid test, dan lain-lain. Belanja tersebut menggunakan akun khusus COVID-19 dan menjadi beban dengan akun khusus COVID-19 total sebesar Rp4.316.093.029.

Tabel 87. Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19

No	Satuan Kerja	Beban Barang & Jasa Penanganan Pandemi Covid-19		
		521131	521241	522192
1	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat	514.139.938	-	132.039.899
2	Balai Diklat Kepemimpinan Magelang	28.183.500	-	67.160.000
3	Politeknik Keuangan Negara STAN	632.094.860	1.137.397.145	172.288.114
4	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	33.891.286	-	55.059.700
5	Balai Diklat Keuangan Malang	54.588.290	-	26.405.000
6	Balai Diklat Keuangan Medan	75.641.465	-	9.070.000
7	Balai Diklat Keuangan Palembang	10.735.872	8.660.000	7.440.000
8	Balai Diklat Keuangan Makassar	19.886.916	-	3.100.000
9	Balai Diklat Keuangan Balikpapan	21.690.181	12.936.308	9.300.000
10	Balai Diklat Keuangan Cimahi	29.731.633	47.951.205	
11	Balai Diklat Keuangan Manado	20.263.000	29.600.000	7.150.000
12	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	176.994.022	-	24.818.000
13	Pusdiklat Pajak	261.289.690	-	28.721.500
14	Pusdiklat Bea Cukai	186.000.000	-	
15	Pusdiklat Keuangan Umum	191.127.058	-	
16	Pusdiklat PSDM	48.116.690	-	14.500.000
17	Pusdiklat KNPk	6.450.000	-	18.020.000
18	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	7.699.733	-	5.500.000
19	Balai Diklat Keuangan Pontianak	24.970.000	-	79.077.114
20	Balai Diklat Keuangan Denpasar	25.704.910	-	50.700.000
	TOTAL	Rp 2.369.199.044	Rp 1.236.544.658	Rp 710.349.327

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp25.846.998.524

Beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.846.998.524 dan Rp21.407.984.227. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 87.

Tabel 87. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.385.089.162	14.175.073.418	36,75
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	76.274.315	-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.684.309.788	6.055.660.129	(6,13)
Beban Pemeliharaan Jaringan	6.707.500	121.830.990	(94,49)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	694.617.759	1.049.752.550	(33,83)
Beban Persediaan suku cadang	-	5.667.140	(100,00)
Jumlah Beban pemeliharaan	25.846.998.524	21.407.984.227	20,74

Beban pemeliharaan mengalami kenaikan per 31 Desember 2020 sebesar 20,74% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. adanya pemeliharaan gedung PHRD yang dilakukan pada awal tahun anggaran dalam rangka persiapan *pre-departure training*;
2. perbaikan kursi kelas, atap gedung E dan P, serta penataan ulang jaringan listrik gedung D dan F oleh PKN STAN;
3. penggunaan gedung kantor baru milik sendiri di BDK Pekanbaru;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang PJJ; dan
5. pekerjaan pengecatan dan renovasi gedung di beberapa satker lainnya.

Terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, terdapat Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 yang digunakan untuk pemeliharaan gedung berupa pembuatan wastafel cuci tangan dan instalasi air dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 88. Rincian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19

No	Satuan Kerja	31 Desember 2020 (Rp)
1	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat	10.283.000
2	Politeknik Keuangan Negara STAN	10.150.000
3	Pusdiklat PSDM	3.051.300
4	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	4.239.400
5	Balai Diklat Keuangan Medan	20.137.615
4	Balai Diklat Keuangan Pontianak	28.413.000
	TOTAL	Rp 76.274.315

Beban Perjalanan
Dinas
Rp8.720.170.748

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.720.170.748 dan Rp74.527.666.419. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi atas pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 89.

Tabel 89. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.728.319.422	50.654.434.832	(84,74)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	518.294.745	2.980.983.672	(82,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	58.128.000	696.659.787	(91,66)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	268.264.935	11.931.797.981	(97,75)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	-	2.306.384.452	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	69.363.294	1.752.611.523	(96,04)
Beban Perjalanan	77.800.352	4.204.794.172	(98,15)
Jumlah	8.720.170.748	74.527.666.419	(88,30)

Beban perjalanan dinas mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 88,30% atau mencapai Rp65.807.495.671 sampai dengan periode 31 Desember 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPPK. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang semula direncanakan klasikal diubah metodenya menjadi *e-learning* dan PJJ sehingga tidak membutuhkan biaya perjalanan dinas, baik untuk peserta maupun pengajar. Selain itu, beberapa kegiatan juga terpaksa dibatalkan maupun diubah metode pelaksanaannya secara virtual.

Hal lain yang mempengaruhi penurunan beban perjalanan dinas yaitu adanya pembatasan perjalanan dinas luar kota di masa Pandemi COVID-19 dan efisiensi perjalanan dinas berupa pembayaran uang harian perjalanan dinas sebesar maksimal 80% dari tarif SBM sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku sejak 29 Juli 2019.

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp77.526.446.859

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp77.526.446.859 dan Rp70.113.862.691. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Amortisasi mulai diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2016. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 90.

Tabel 90. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.774.733.704	37.273.223.065	17,44
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.526.287.328	29.361.156.658	0,56
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.993.351.385	1.540.868.874	29,37
Beban Penyusutan Irigasi	407.216.467	402.136.098	1,26
Beban Penyusutan Jaringan	841.587.826	987.923.991	(14,81)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	76.891.511	52.876.862	45,42
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	332.400.175	419.408.207	(20,75)
Beban Amortisasi Software	545.184.863	61.872.136	781,15
Beban Amortisasi Lisensi	28.793.600	14.396.800	100,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	77.526.446.859	70.113.862.691	10,57

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
tertagih
(Rp72.038.966)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar minus Rp72.038.966 dan minus Rp57.642.262. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 91.

**Tabel 91. Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	(10.011.314)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(1.182.227)	(3.313.209)	(64,32)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	14.500	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(925.823)	5.554.938	(116,67)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(69.930.916)	(49.887.177)	40,18
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(72.038.966)	(57.642.262)	24,98

Beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah minus Rp72.038.966 atau turun 24,98% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan beban ini terutama disebabkan karena adanya penyesuaian nilai kurs atas TGR di Sekretariat BPPK. Sedangkan untuk beban penyisihan piutang lainnya dan beban penyisihan piutang tak tertagih jangka panjang lainnya mengalami penurunan karena adanya pelunasan/pembayaran piutang di Satker PKN STAN dan Pusklat PSDM.

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp13.252.687.505

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 92.

Tabel 92. Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(13.408.235.289)	(1.239.681.821)	981,59
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	852.761.109	278.402.609	206,30
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	526.919.437	333.732.890	57,89
Beban Kerugian Pelepasan Aset	14.787.915.835	1.851.817.320	698,56
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	155.547.784	511.010.620	(69,56)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	-	-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	60.373.436	59.451.729	1,55
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	194.118.829	273.107.162	(28,92)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	29.933.370	84.917.055	(64,75)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	425.823.625	6.934.325.362	(93,86)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	399.039.980	6.725.011.704	(94,07)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	155.661.496	115.778.984	34,45
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(13.252.687.505)	(728.671.201)	1.718,75

Defisit pelepasan aset nonlancar per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan yang berasal dari penghapusan BMN pada 18 satker dilingkungan BPPK. Sementara itu, surplus dari kegiatan non-operasional lainnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Surplus dari kegiatan non-operasional lainnya sebesar Rp155.547.784 atau turun sebesar 69,56% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, hal ini karena pada tahun 2019 terdapat nilai pendapatan dan beban penyesuaian nilai persediaan yang cukup besar.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp7.056.642.468.557

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.056.642.468.557 dan Rp6.864.286.856.450.

Defisit LO
Rp401.738.828.
539

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp401.738.828.539 dan minus Rp558.257.975.548. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp0

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Penyesuaian Nilai Persediaan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp4.788.617.

Koreksi atas
Reklasifikasi
(Rp31.720.882)

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi atas perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar agar sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp31.720.882 dan minus Rp31.044.720. Koreksi atas Reklasifikasi yang terjadi sampai dengan 31 Desember 2020 disebabkan oleh reklasifikasi BMN berupa papan nama pada BDK Yogyakarta dari klasifikasi Bangunan Lain menjadi Peralatan dan Mesin sesuai rekomendasi dari Tim Penilaian Kembali BMN, DJKN.

Selisih Revaluasi
Aset
(Rp287.657.000)

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar minus

Rp287.657.000 dan Rp158,181,512,371. Rincian nilai Selisih Revaluasi Aset per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 93.

Tabel 93. Rincian Selisih Revaluasi Aset per 31 Desember 2020

No.	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	Pusdiklat Pajak	(259.391.000)
2	Pusdiklat Bea dan Cukai	(28.266.000)
Jumlah		(287.657.000)

Koreksi Nilai
Aset Non-
Revaluasi
(Rp8.882.564.50
0)

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi nilai aset tetap selain karena adanya inventarisasi dan penilaian (revaluasi) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi berasal dari koreksi saldo awal, koreksi perubahan nilai/kuantitas, inventarisasi barang berlebih, dan koreksi pencatatan. Koreksi Penilaian Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar minus Rp8.882.564.500 dan Rp9.455.748.289. Rincian transaksi Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 94.

Tabel 94. Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2020

No.	Nama Satker	Nilai (Rp)
1	Pusdiklat Pajak	(9.297.810.820)
2	Pusdiklat Bea dan Cukai	28.266.000
3	Pusdiklat Keuangan Umum	(3.801.208)
4	PKN STAN	552.192.310
5	BDK Pekanbaru	(119.553.807)
6	BDK Cimahi	(41.856.975)
Jumlah		(8.882.564.500)

Lain-Lain
Rp0

E.4.5 Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas Beban, koreksi atas Hibah, koreksi atas Piutang, dan koreksi atas Kewajiban. Adapun nilai Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.302.276.620.

Transaksi Antar
Entitas
Rp452.378.501.
300

E.5 Transaksi Antar-Entitas

Transaksi Antar-Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp452.378.501.300 dan Rp581.700.306.478. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar-K/L, antar-BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian transaksi antar-entitas per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 95.

Tabel 95. Transaksi Antar-Entitas per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	455.826.517.246
Diterima dari Entitas Lain	(3.448.015.946)
Transfer Masuk	86.389.357.201
Transfer Keluar	(86.389.357.201)
Jumlah	452.378.501.300

DDEL
Rp3.448.015.94
6
DKEL
Rp455.826.517.
246

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar-entitas atas pendapatan dan belanja pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp3.448.015.946 sedangkan DKEL sebesar Rp455.826.517.246.

Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp86.389.357.2
01

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar-K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp86.389.357.201. Adapun rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran.

Pengesahan
Hibah Langsung/
Pengembalian
Pengesahan
Hibah Langsung
Rp0

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung entitas dalam bentuk kas, barang, maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh Bagian Anggaran (BA)-BUN. Pengesahan

Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Adapun Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp7.098.080.19
8.936

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.098.080.198.936 dan Rp6.863.778.959.753.